

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 8, 9 DAN 16 SEPTEMBER 2020



TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Agustus 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. Bisri Cholil Laqouf**
2. Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 41 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Dan yang kami hormati

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2020, kita berkesempatan bertemu untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pertama dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa ***“Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”***. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 41 orang. Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan

ketentuan yang berlaku, maka keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 11. 39 WIB Rapat Paripurna Pertama dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena perubahan keadaan, jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. Keadaan darurat; dan / atau
- e. Keadaan luar biasa.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD pada tanggal 7 September 2020, selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara pokok pada rapat paripurna ini yaitu Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Perlu saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk penjelasan bupati ini, sesuai kesepakatan pada rapat Badan Muisyawarah tanggal 7 September 2020 akan disampaikan oleh Pj. Sekda Kabupaten Rembang. Hal ini disebabkan karena pada hari ini dan besok pagi, Saudara Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir, karena mengikuti tes kesehatan untuk kelengkapan persyaratan Pilkada Tahun 2020 di Semarang.

Untuk itu kepada Pj. Sekda, waktu dan tempat disilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KAB. REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

===

Terima kasih Saudara Drs. Achmad Mualif atas penyampaiannya.

➤ (*Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama, penjelasan Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Dengan telah disampaikannya penjelasan atas Raperda, maka selesai sudah agenda acara pada rapat paripurna ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna ini, saya mengingatkan kembali bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Senin, 7 September 2020, disepakati perubahan jadwal pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Banmus pada hari Rabu tanggal 2 September 2020. Dengan mempertimbangkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyatakan agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, maka pada kesempatan ini saya meminta persetujuan Bapak dan Ibu anggota DPRD sekalian,

“ Apakah Keputusan Badan Musyawarah tanggal 7 September 2020 yang merubah agenda kerja DPRD yang sudah ditetapkan pada tanggal 2 September 2020 dapat disetujui ? ”

===== Setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih.

Selanjutnya setelah selesai rapat paripurna ini, akan ditindaklanjuti dengan rapat fraksi-fraksi dalam menyusun pandangan umum untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Kedua, esok pagi Rabu tanggal 9 September 2020.

Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah* " tepat pukul WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Sekian .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA ,



H. BISRI CHOLIL LAQOUF

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

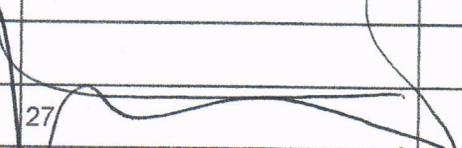
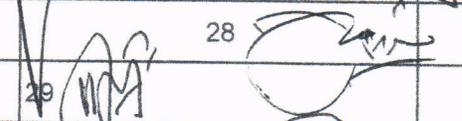
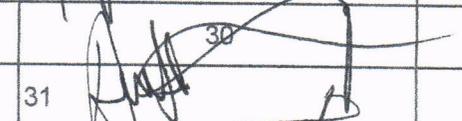
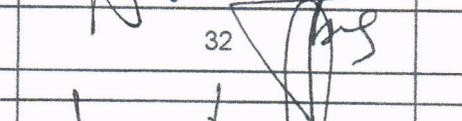
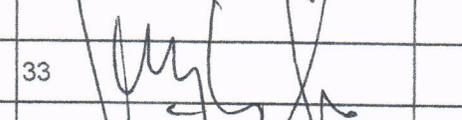
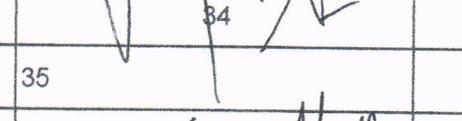
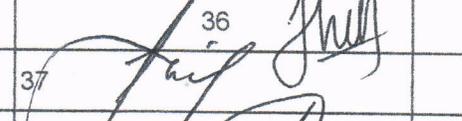
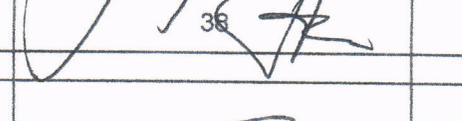
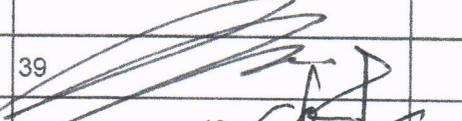
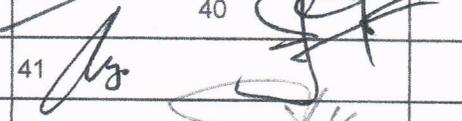
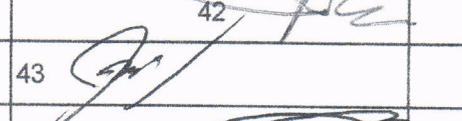
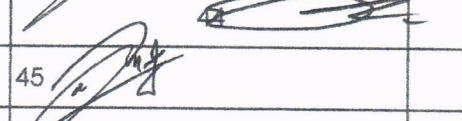
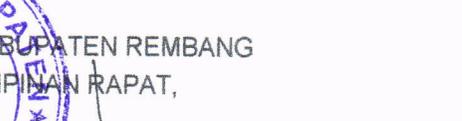
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Bupati dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten
Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

HARI/TANGGAL : SELASA, 8 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	SUGIHARTO	Anggota	1	
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	2	
3	SUMARDI	Anggota	3	
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	4	
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	5	
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	6	
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	7	
8	H. SUPADI	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10			10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Plt. Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PDI PERJUANGAN				
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD		
28	JASMANI	Anggota		
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota		
30	WIDODO, S.H.	Anggota		
31	ADI PURWOTO	Anggota		
32	SUMARSIH	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT HANURA				
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota		
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota		
35	H. HARNO, S.E.	Anggota		
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota		
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota		
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA				
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota		
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota		
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota		
42	AGUS SUTRISNO	Anggota		
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota		
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota		
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota		

Keterangan :

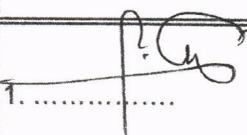
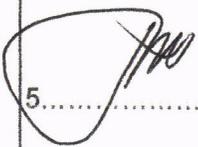
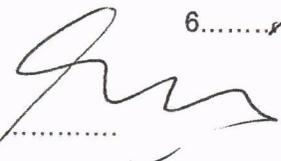
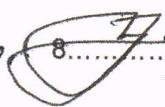
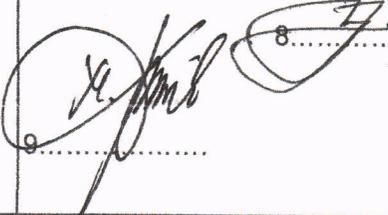
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

HARI/TANGGAL : SELASA, 8 SEPTEMBER 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekretaris Daerah	
2	Asisten I Sekda	2.....
3	Asisten II Sekda	3.....
4	<i>Munirala</i>	Asisten III Sekda	
5	<i>MUKTI</i>	Ka. BPPKAD	
6	<i>DWI WAHYUNI H.</i>	Ka. BAPPEDA	
7	<i>Mi Hajar</i>	Kabag. Hukum Setda	
8	<i>Wahyu Dian</i>	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	
9	<i>NURPURNOMO MW</i>	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

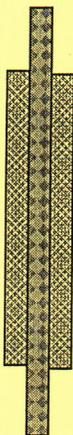
Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

R A N C A N G A N P E R U B A H A N P E R A T U R A N D A E R A H
T E N T A N G A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N
B E L A N J A D A E R A H
K A B U P A T E N R E M B A N G



T A H U N A N G G A R A N
2 0 2 0



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM, Rekan Media dan tamu undangan yang berbahagia.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Legislatif atas berbagai masukan yang telah diberikan selama pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2020 dan akhirnya telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Insya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Tujuan utama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah serta mengatasi wabah penularan Covid - 19 di Kabupaten Rembang.

Pembahasan Perubahan RAPBD ini diharapkan tetap dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai dengan kebijakan pembangunan tahun 2020 yang bertemakan "***Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Inovatif dan Kreatif***" dengan fokus pembangunan yaitu :

- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- Penurunan angka kemiskinan;
- Percepatan pertumbuhan ekonomi;
- Perluasan kesempatan kerja;
- Kualitas infrastruktur;
- Perwujudan *Good Governance*.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
3. Pembangunan jalan dan jembatan
4. Rehabilitasi jaringan irigasi
5. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat
6. Penataan lingkungan permukiman
7. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani
8. Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan
9. Pengelolaan TPI terpadu
10. Pembangunan pasar
11. Pengembangan destinasi pariwisata

12. Progran Keluarga Berencana
13. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
14. Penanganan Stunting
15. Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19

Perubahan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam Perubahan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1,859 Trilliun. Jumlah ini turun 0.98% dari target pendapatan daerah pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp.1,891 Trilliun.

Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,859 Trilliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 291 milyar, Dana Perimbangan sebesar 1,021 trilliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.547 milyar.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp.1,885 Trilliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.1,201 Trilliun dan Belanja Langsung sebesar Rp.684 Milyar.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk **Bidang Pendidikan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan **20% lebih** dari belanja daerah. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2020 Belanja Bidang Pendidikan (Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) sebesar Rp.452 Milyar, atau **24,00%** dari total Belanja Daerah.

Demikian juga untuk **Bidang Kesehatan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal **10%** dari total belanja APBD diluar gaji. Dalam Perubahan RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2020 Belanja Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.123 milyar atau 10.00% dari total belanja daerah diluar gaji.

3. Pembiayaan Daerah :

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan RAPBD TA 2020 untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 4.3 Milyar, pada PDAM

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 :

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	1.859.890.949.423
Pendapatan Asli Daerah	291.002.773.423
Pendapatan Pajak Daerah	80.026.500.000
Hasil Retribusi Daerah	14.728.896.775
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.309.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.407.067.648
Dana Perimbangan	1.021.651.523.000
Dana Transfer Umum	787.373.341.000
Dana Transfer Khusus	234.278.182.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	547.236.653.000
Hibah	66.256.175.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.622.999.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	356.270.479.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.087.000.000

Uraian	Jumlah
BELANJA	1.885.866.377.240
Belanja Tidak Langsung	1.201.751.133.005
Belanja Pegawai	646.236.339.515
Belanja Bunga	1.631.632.000
Belanja Hibah	87.502.210.000
Belanja Bantuan Sosial	4.079.720.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.357.333.100
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	392.677.638.587
Belanja Tidak Terduga	57.266.259.803
Belanja Langsung	684.115.244.235
Belanja Pegawai	234.164.220.523
Belanja Barang dan Jasa	277.633.073.019
Belanja Modal	172.317.950.693
SURPLUS / (DEFISIT)	(25.975.427.817)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	120.143.795.817
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	40.143.795.817
Penerimaan Pinjaman BLUD	80.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	94.168.368.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.300.000.000
Pembayaran Pokok Utang	83.868.368.000
PEMBIAYAAN NETTO	25.975.427.817
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 7 September 2020

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ





BUPATI REMBANG

SURAT TUGAS

Nomor : 800 / 1826 / 2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
NIP : 19620804 198803 1 011
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Madya / IV c
Jabatan/Instansi : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Maksud : 1. Membacakan Nota Keuangan Rancangan Perda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
2. Menjawab pemandangan umum fraksi atas Rancangan
Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Rembang
Pada tanggal : 07 September 2020

BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Rabu
Tanggal : 9 September 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020;
3. Skors (Penyusunan Jawaban Bupati);
4. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020;
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. Bisri Cholil Laqouf**
2. Jabatan : **Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 6 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Bisri Cholil Laqouf

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Dan yang kami hormati

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 kita masih berkesempatan bertemu kembali di ruang rapat paripurna, untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum Rapat Paripurna Kedua dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini, adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama pada tanggal 8 September 2020 kemarin, yaitu *dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.* Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD

dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 38 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11. 39 WIB Rapat Paripurna Kedua dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Terdapat dua agenda pokok yang harus kita laksanakan pada rapat paripurna kedua ini, dan untuk lebih jelasnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna kedua ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Skors (penyusunan jawaban bupati);
4. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
5. Penutup.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita ikuti agenda pokok yang pertama pada rapat paripurna ini, yaitu Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Agar penyampaiannya dapat berjalan lancar, kepada yang ditunjuk sebagai juru bicara, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdri. Siti Rizqiyah Putwi DA
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Nasirudin, S.Si.
3. Fraksi Partai Nasional Demokrat : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdri. Sumarsih
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Dumadiyono, S.H.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H.

Secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ (*Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara berikutnya yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh karena di dalam penyusunan jawaban ini memerlukan

waktu dan pemikiran, maka rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan dalam menyusun jawaban Bupati telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Kita masuki agenda pokok kedua yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Saudara Pj. Sekda, waktu dan tempat disilahkan.

=== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI ===

Terimakasih Saudara Drs. Achmad Mualif atas penyampiannya.

➤ *(Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir)*

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dua agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna kedua pada hari ini. Perlu kami sampaikan, bahwa setelah rapat paripurna, pada hari ini juga akan dilaksanakan rapat Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Rembang dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020. Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillah*”
‘*alamiin*’ tepat pukul 12.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya
nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan kembali bertemu
pada rapat paripurna ketiga atau terakhir dalam membahas Perubahan APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 September
2020.

Sekian .

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA ,

SEKRETARIS,


H. BISRI CHOLIL LAQOUF


Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

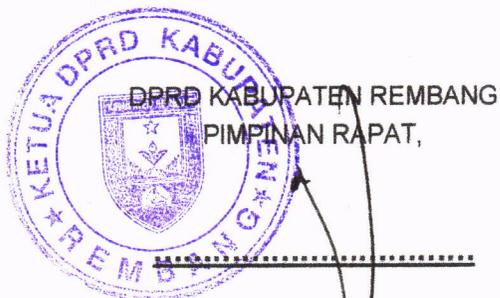
HARI/TANGGAL : RABU, 9 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	SUGIHARTO	Anggota	1	
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	2	
3	SUMARDI	Anggota	3	
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	4	
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	5	
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	6	
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	7	
8	H. SUPADI	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10			10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Plt. Ketua DPRD	11	✓
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35	
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36	
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37	
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40	
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41	
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42	
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43	
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44	
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45	

Keterangan :

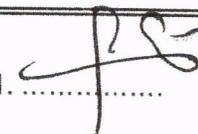
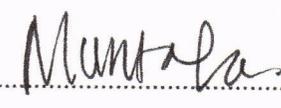
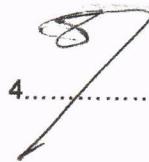
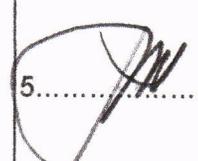
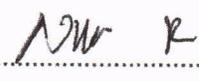
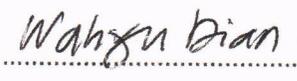
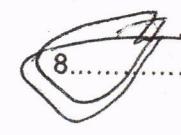
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

HARI/TANGGAL : RABU, 9 SEPTEMBER 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	1. 
2	Asisten I Sekda	2.
3	Asisten II Sekda	3.
4		Asisten III Sekda	4. 
5	MUSTAIN	Ka. BPPKAD	5. 
6		Ka. BAPPEDA	6. 
7	Kabag. Hukum Setda	7.
8		Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8. 
9	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG




Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2020

Rabu , 09 September 2020

Dibacakan oleh : RIZQIYAH PUTRI DWI ANI , SPd

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Pada saat ini , di seluruh bagian tanah air , baik di daerah tingkat Propinsi , kota atau kabupaten, yang masuk dalam daftar kegiatan penyelenggaraan melaksanakan Pilkada serentak pada 09 desember 2020 , sedang disibukkan untuk melaksanakan tahapan demi tahapan, termasuk di kabupaten Rembang tercinta ini, yang tahapanya bererapa hari lalu sudah pada pelaksanaan pendaftaran para pasangan bakal calon. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan harapan yang besar dan mohon kepada ALLAH SWT, Semoga dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini , khususnya Kabupaten Rembang mulai dari tahapan awal sampai ahir, diberikan kelancaran , kemudahan , kondusif , damai dan aman , serta dipilihkan oleh ALLAH SWT, pimpinan yang baik dan amanah , sehingga dapat mewujudkan Rembang ke depan yang lebih baik lagi Amiin.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2020, yang paparan dan penjelasanya telah disampaikan oleh sdr. Pj Sekda Rembang, dalam rapat paripurna kemarin , pada hari ini Selasa , tanggal 08 September 2020.

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang , terutama kepada TAPD , yang telah bekerja keras,

sehingga penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 ini , dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan , sehingga dapat segera untuk dilakukan pembahasan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2020 ini , yang dimulai dari awal pembahasan KUPA/PPAS Perubahan 2020 , sampai disepakatinya KUPA/PPAS , oleh Pihak Excutif dan DPRD , dalam rapat Paripurna pada hari Kamis , tanggal 03 September 2020 yang lalu , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan catatan dan masukan , sebagai berikut :

1. Di dalam Laporan Realisasi APBD Induk Tahun Anggaran 2020 , sampai dengan triwulan ke II , dilaporkan bahwa realisasi kegiatan dari seluruh OPD , capaian progressnya baru sebesar 38,12 % , dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar 25,18 % , Progress tersebut termasuk dalam kategori *RENDAH* atau *LAMBAT* , Dan sampai pada ahir pembahasan KUA/PPAS Perubahan ini, capaian Progress Kumulatif pelaksanaan kegiatan dan penyerapan APBD Induk 2020, belum terbaca dengan jelas. Maka sehubungan dengan hal tersebut , agar penyerapan APBD Perubahan tahun 2020 bisa maksimal , dan tidak terjadi Silpa yang tinggi , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta , agar Pihak Excutif dan semua Jajarannya , meningkatkan kinerjanya, dengan bekerja lebih keras dan semangat yang penuh optimis , sehingga dapat menyelesaikan semua program yang telah kita rencanakan.
2. Di dalam penganggaran kegiatan disampaikan bahwa , jumlah biaya belanja sebesar Rp. 1,885 Triliun , dengan rincian untuk Biaya Tidak langsung sebesar Rp. 1,201 triliun (63,71 %) dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 648 Miliyar (36,29 %). Melihat rasio perbandingan Biaya Langsung yang terlalu kecil ini (36,29%) , kami menilai kebutuhan utk pembangunan sarana dan prasarana baik sarana jalan dan yang lain untuk kebutuhan masyarakat masih belum tercukupi , terkait hal tersebut kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta, agar ke depan penganggaran prioritaskan kebutuhan masyarakat bisa dickupi.
3. Terkait bidang kepariwisataan , bahwa masih adanya keluhan para pekerja seni , yang masih banyak kesulitan dalam melakukan kegiatan profesinya, sehingga pendapatan biaya hidup masih susah, sehubungan dengan kondisi hal tersebut, Kami mohon agar Pemkab melalui OPD dan para Pihak terkait, dapat lebih peduli untuk membantu kesulitan masyarakat , khususnya para profesi pekerja seni di kabupaten rembang ini.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan.

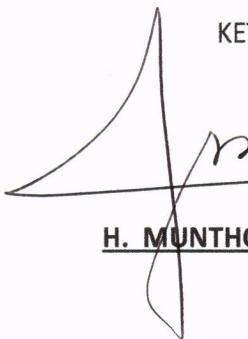
Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya....

Billahi Taufiq wal Hidayah..., Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 09 September 2020

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA


H. MUNTHOHID SH



SEKRETARIS


H. SUNARDI , SPdi



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

ATAS

RAPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2020

Disampaikan oleh :.....

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Rabu, 9 September 2020

Assalamu 'alaikumwb.wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, PLT Ketua dan Para Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkungan Pemkab Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang *Atas Raperda PERUBAHAN APBD TA. 2020* dalam Keadaan Sehat Wal afiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Tentu kami, **FPKB** menyetujui apabila Raperda ini segera di bahas melalui mekanisme rapat-rapat berikutnya di DPRD sehingga nanti PERUBAHAN APBD 2020 sebagai pedoman pemkab dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa ditetapkan pada waktu yang seharusnya sebagaimana amanat perundang-undangan.

Hadirinsidangparipurna yang terhormat,

Kami juga memberikan apresiasi atas semangat dan niat baik Pemkab Rembang dalam merancang perubahan APBD 2020 dengan tujuan utama sebagaimana di sampaikan oleh Sdr. Bupati yaitu memperkuat sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektivitasan tarwilayah untuk pengembangan potensi wilayah, serta pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan guna perwujudan pemerintahan yang amanah serta mengatasi wabah penularan covid-19 di Kabupaten Rembang. Namun perkenankan kami memberikan catatan-catatan sebagaimana berikut :

PENDAPATAN DAERAAH

FPKB mencermati penurunan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pendapatan pajak Daerah sebesar Rp. 20.495.750.000,- dan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.329.694.225,- sehingga total penurunan target PAD dari kedua sumber ini adalah Rp. 28,8 Milyar. Menurut kami, penurunan ini cukup signifikan dan perlumendapatkan perhatian serius mengingat PAD merupakan salah satu factor

kemandirian daerah. Mengapa hal ini bias terjadi dan apa yang telah dilakukan pemkab untuk mengatasi kondisi semacam ini.

BELANJA DAERAH

Pada belanja tidak langsung untuk belanja pegawai terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 52 milyar atau 7,46 persen. Menurut kami penurunan ini cukup besar sehingga kami merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan mengapa hal ini bias terjadi.

LAIN-LAIN

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan perubahan APBD Kab. Rembang TA. 2020 untuk pencegahan penularan dan penanganan dampak covid-19 sebesar kurang lebih Rp. 76 Milyar tentu harus mempedomani pada peraturan-peraturan yang ada. Makadari itu FPKB menekankan agar pemkab berhati-hati dalam menyusun Plan Action penanganan penularan dan dampak covid-19 sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Hadirin siding paripurna yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKB, Selanjutnya FPKB menyatakan **MENERIMA** Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas lebih lanjut agar diperoleh Perubahan APBD yang lebih bertanggungjawab serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya,

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

WassalamualaikumWr. Wb

Rembang, 9 September 2020

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

H. YAS



sekretaris

NASIRUDIN, S.Si



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua
Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;
Yth. Saudara Wakil Bupati Rembang;
Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui Raperda Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kami telah mendengar dan menyimak pengantar nota keuangan rancangan perubahan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami Fraksi NasDem akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Sebagaimana kita ketahui APBD tahun ini mengalami pergeseran atau refocusing karena adanya pandemi COVID-19. Maka banyak program pembangunan yang tertunda dan belum terlaksana. Untuk itu kami mendukung penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini akan tetapi perlu juga dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar diperukan agar pembangunan berjalan efektif.
2. Menyikapi musim kemarau yang mengakibatkan banyaknya desa yang dilanda kekeringan, kami meminta Pemkab melalui OPD terkait, dalam hal ini BPBD bisa lebih sigap lagi dalam penanganannya. Bantuan air bersih untuk keperluan makan minum, MCK sangat dibutuhkan.
3. Kami berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2020 dapat tercapai dengan baik meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi masih akan dinamis.
4. Mengenai program penanganan wabah virus corona covid-19, kami berharap pemerintah Kabupaten Rembang serius menanganinya serta transparan dalam hal penggunaan anggaran tersebut.
5. Sebagai upaya dalam pencapaian dan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Rembang dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif.
6. Kebijakan pemerintah Kabupaten Rembang dalam membuka wisata perlu dikaji dengan baik untuk mencegah penyebaran virus corona covid-19 agar tidak terjadi kluster baru di tempat wisata.

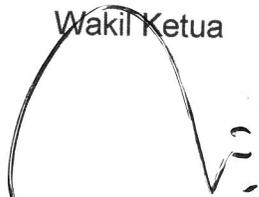
Demikian pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 9 September 2020

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Wakil Ketua



KHAMID, SE, Sy.

Sekretaris



FRIDA IRIANI



FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2020

Hari / Tanggal : Rabu / 9 September 2020

Dibacakan oleh : Adi Purwoto

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati yang diwakilkan oleh PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten
Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang
kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Menanggapi penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan berpendapat :

- Yang pertama, terkait dengan panjangnya musim kemarau yang menyebabkan banyak wilayah yang terdampak kekeringan, serta potensi terjadinya bencana kebakaran, maka kami mengusulkan untuk melakukan penambahan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta mengurangi potensi bahaya kebakaran tersebut, dan juga untuk pengadaan air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan.
- Yang kedua, kami mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dapat lebih memaksimalkan penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam hal ini termasuk penambahan Alat Perlindungan Diri (APD) yang cukup bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas, sehingga dapat menekan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.

- Yang terakhir mengenai dana bantuan sebesar 5 miliar pada PD. BPR BKK Lasem. Hal ini terkait dengan penyaluran dana pinjaman kepada UMKM yang terdampak Covid-19, kami mengharapkan dapat dilakukan evaluasi yang mendalam untuk realisasi penyaluran dana tersebut, sehingga penyaluran tersebut bisa tepat sasaran, dapat merata, dan tidak terkesan ada diskriminasi dalam penyaluran kepada UMKM penerimanya.

Demikianlah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Aamiin...

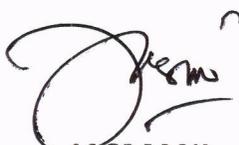
Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


JASMANI



Sekretaris


WIDODO, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
ATAS PENJELASAN BUPATI TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

RABU, 9 SEPTEMBER 2020

Dibacakan oleh : MUGIYARTO,S.T

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati, wakil bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat bertatap muka dalam menghadiri sidang Paripurna tentang Raperda Perubahan APBD tahun 2020 Kabupaten Rembang ini dalam keadaan sehat walafiat dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar diri ke KPU, untuk itu

kami menghimbau kepada Masyarakat Rembang untuk menjaga kondusifitas demi kenyamanan kita bersama bahwa kita semua bersaudara.

Bupati , Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini iijinkan kami Fraksi Demokrat-Hanura menyampaikan beberapa saran, pendapat dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini :

1. Disaat menjelang Pilkada ini kami Mohon Pemda jangan melupakan pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Rembang. Puskesmas dan RSUD kita dorong, beri semangat dan Alat Pelindung Diri (APD) dicukupi supaya tetap bekerja dengan baik.
2. Tahun ini terjadi lagi Anggaran terkait urusan wajib dianggarkan 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) bulan sehingga di Perubahan ini sangat berat, Misalnya Siltap perangkat Desa, Honor guru Paud, Madin dan lain-lain.
3. Kemiskinan di Kabupaten Rembang setiap tahun jumlahnya tidak pernah berkurang apalagi di musim Pandemi Covid-19 ini jumlahnya bertambah banyak untuk itu kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang serius menangani masalah kemiskinanini. Perlu dipikirkan Formula, Program dan Kegiatan Prioritas yang dapat mencapai target dan sasaran kami juga bertanya Dinas apa saja yang terlibat dalam menangani Kemiskinan ini.
4. Mohon Pemerintah Daerah jangan pilih kasih dalam pemberian bantuan kepada yang terdampak Covid misalnya, bantuan hibah kepada Pengusaha Batik sebesar 1 Milyar sedangkan bantuan kepada pedagang kecil di pasar-pasar dipinjamkan lewat BKK dengan bunga 4 % ini sangat timpang dan tidak adil.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 9 September 2020

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

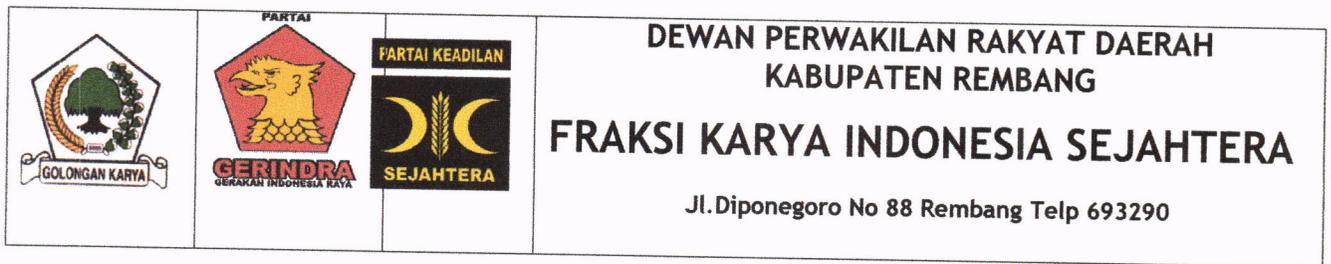
SEKRETARIS



MUGIARTO, S.T



DUMADIYONO, S.H.



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
Penjelasan Bupati tentang Rancangan Perda
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Rabu, 9 September 2020
Juru Bicara: PUJI SANTOSA, SP, MH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang atas nama Bapak Bupati yang berhalangan hadir
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Tak lupa mengingatkan bahwa kita masih dalam suasana covid_19 maka marilah kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari covid_19 ini

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Membaca Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang kemarin disampaikan oleh Sdr. Pejabat Sekda yang mewakili Bapak Bupati kemarin, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera memberi apresiasi kepada pemerintah, “ing atase” dalam situasi yang terpojok karena corona masih bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik.

Kami memaklumi penurunan Pendapatan Asli Daerah dari APBD 2020 Induk sebesar Rp.307.256.621.706,00 berkurang Rp. 16.255.848.283,00 menjadi Rp.291.002.773.423,00 pada APBD 2020 Perubahan, sehingga secara keseluruhan Pendapatan Daerah juga turun Rp. 16.225.848.283,00 dari APBD 2020 Induk sebesar Rp.1.891.753.253.706,00 menjadi Rp.1.859.890.949.423,00 pada APBD 2020 Perubahan.

Demikian pula penurunan Belanja Daerah secara keseluruhan turun sebesar Rp. 78.567.452.522,00 dari APBD 2020 Induk Rp.1.964.433.829.762,00 menjadi Rp.1.885.866.377.240,00 pada APBD 2020 Perubahan.

Namun terdapat beberapa hal yang kami mintakan penjelasan dan harapan kepada pemerintah al:

- Mengapa Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan pemerintah daerah lainnya turun dari Rp. 106.030.000.000,00 menjadi Rp. 195.622999.000,00
Mohon penjelasannya.
- Adanya PLT di beberapa OPD strategis dalam waktu yg sangat lama menyebabkan pekerjaan dan layanan kepada masyarakat terganggu. Ini menandakan Bupati tidak tanggap dan kurang professional dalam menata pemerintahan.
Mohon penjelasannya.
- Terkait bantuan untuk UMKM terdampak Covid 19 ada ketidakadilan dimana ada yang berbentuk hibah ada yang berbentuk pinjaman lunak. Padahal tujuan dan sumber dananya sama.
Mohon penjelasannya.
- Adanya temuan beberapa proyek besar sudah jalan padahal belum memenuhi perijinan yang ada menandakan pemkab tidak serius mewujudkan tata kelola perijinan yang rapi dan upaya menaikkan PAD.
Mohon penjelasan.
- Kondisi pasien terpapar dan korban meninggal akibat Covid 19 yang semakin banyak dan terkesan tidak terkendali, menandakan pemkab lewat gugus tugas Covid 19 tidak serius dan tidak tanggap atas upaya pencegahan penularan. Seperti tidak ada kontrol dan evaluasi.
Mohon penjelasannya.

- Dialokasikan kemana saja Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya yakni DID (dana insentif daerah) sebesar Rp. 13.087.000.000,00
Mohon penjelasannya.
- Fraksi KIS merasa kecewa dengan penjadwalan pembahasan Raperda Perubahan APBD. Mestinya pembahasan Perubahan APBD itu dilaksanakan bulan Juli sehingga cukup waktu untuk meengeksekusinya. Kalau seperti ini bulan September baru didok, pelaksanaannya tidak akan sempurna bahkan bisa gagal.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk mewadahi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan RAPBD nanti kami minta benar-benar memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi corona ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup pemandangan umum ini mari kita berdoa agar musibah corona ini segera pergi dan kita bisa bekerja seperti sedia kala. Demikian pula kami berharap proses Pilkada ini berlangsung dalam suasana kondusif dengan semangat paseduluran.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

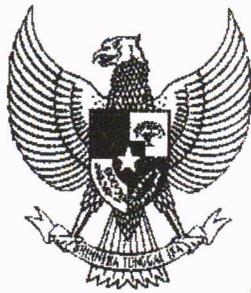
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua, Sekretaris,

AGUS SUTRISNO PUDJI SANTOSA, SP, MH



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2020



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
I. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
	<p>1. Penganggaran Program dan Kegiatan agar dapat dilakukan secara efisien agar serapan anggaran dapat maksimal sehingga tidak terjadi SiIPA yang tinggi.</p>	<p>1. Pada Perubahan APBD Tahun 2020, semua SKPD telah diminta untuk dapat menganggarkan Program dan Kegiatan se Efektif mungkin dikarenakan Jumlah Anggaran yang banyak terserap dalam penanganan Covid-19. Terhadap penyerapan belanja, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan pemantauan secara berkala baik capaian kinerja maupun serapan anggaran setiap bulannya. Atas capaian yang disampaikan secara berkala tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi sehingga apabila terjadi kendala – kendala yang dihadapi dapat segera disusun strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.</p>
	<p>2. Masih adanya Keluhan dari pekerja seni yang masih kesulitan dalam melakukan kegiatan profesinya.</p>	<p>2. Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800/1468/2020 tentang Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Seni di Kabupaten Rembang pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap Covid-19 sebagai pedoman baik bagi Pekerja Seni, Pengunjung/Penonton sampai dengan Pengguna Jasa dalam menjalankan aktivitas/pertunjukan seni di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah berkoordinasi dengan POLRES Rembang sampai Dengan POLSEK atas kemudahan dalam memberikan ijin keramaian, namun</p>

			demikian tidak dapat dipungkiri atas daerah yang banyak terdapat Pasien yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 perlu dilakukan Peninjauan Ulang atas Ijin Pertunjukan Seni yg akan diterbitkan guna mencegah penyebaran Covid-19 agar tetap terkendali.
II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
	1. Adanya penurunan Target PAD dan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk lebih kreatif dalam menggali potensi peningkatan Pendapatan Daerah	1.	Sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi NASDEM. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui BPPKAD Kabupaten Rembang telah menghitung potensi-potensi atas Penerimaan pada Sektor PAD. Terhadap LRA Tahun 2018 dan 2019 pada sektor PAD Tahun 2019 telah terdapat kenaikan sebesar 3,97% dibandingkan pada tahun 2018. Namun demikian ada beberapa kendala yang ditemui antara lain kewenangan harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kewenangannya oleh Gubernur dan adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini yang sangat berdampak pada penerimaan dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Karena pandemi tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati Nomor 900/1229/2020 tentang Pembebasan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan di Area Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tempat Bongkar Muat Es

			<p>untuk Kapal Perikanan di Lingkungan TPI dan Persewaan Basket Ikan di Lingkungan TPI Di Kabupaten Rembang. Namun Demikian Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus menggali potensi-potensi yang ada pada sektor PAD untuk kedepan.</p>
	2.	<p>Penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp. 52 Milyar atau 7,46%</p>	<p>2. Penurunan Belanja Pegawai tersebut dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PNS yang telah memasuki masa pensiun yang jumlah sebelumnya adalah sebanyak 6.639 PNS menjadi sebanyak 6.249 PNS sehingga PNS yang telah memasuki masa pensiun sebanyak 390 PNS; 2. Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang semula Tambahan Penghasilan Pegawai yang direncanakan di berikan sebanyak 14 bulan karena kebijakan Pemerintah Pusat hanya di berikan sebanyak 12 Bulan; 3. PNS eselon 2, DPRD dan Bupati yang tidak mendapatkan Gaji ke 13 dan Bupati untuk Gaji ke 14; dan 4. Kebijakan Pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan Sertifikasi Guru se Kabupaten Rembang.
	3.	<p>Mengenai penanganan wabah Covid-19, Pemerintah Kabupaten Rembang diminta serius untuk penanganannya dan transparan dalam penggunaan anggaran tersebut.</p>	<p>3. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi NASDEM, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat-Hanura dan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Operasional Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Bupati Nomor 440/1457/2020 tentang Perubahan Rencana Operasional Percepatan Penanganan Corona Virus</p>

			<p>Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Rembang. Penanganan Covid-19 terbagi menjadi tiga prioritas yaitu : Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial.</p> <p>Dapat diketahui bahwa RSUD dr. R. Soetrasno atas kinerjanya direkomendasikan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan Pasien terkonfirmasi positif karena fasilitas yang sarana/prasarana kesehatan yang dimiliki lengkap dan ruang isolasi yang memadai. Dalam hal transparansi anggaran, Pemerintah Kabupaten Rembang secara rutin sebelum tanggal 04 pada awal bulan telah menyampaikan Laporan Kinerja Penanganan Covid-19 di Kabupaten Rembang kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah KEMENDAGRI baik berupa Serapan Anggaran maupun Output dari masing-masing kegiatan. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui INSPEKTORAT Kabupaten Rembang juga telah melakukan secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap SKPD Fungsional Pengampu Kegiatan Penanganan Covid-19 atas pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rembang</p>
III. FRAKSI NASDEM			
	1.	Menyikapi musim kemarau yang mengakibatkan banyak desa kekeringan, Pemkab	1. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui BPBD telah

	melalui BPBD diminta untuk lebih sigap dalam penanganannya		menganggarkan dropping air bersih sebanyak 1.000 tangki untuk 64 Desa di Kabupaten rembang, untuk dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini BPBD telah menyalurkan sebanyak 80 tangki ke desa-desa yang telah terdampak kekeringan.
	2. Perlu untuk mengkaji Pembukaan Tempat Wisata untuk mencegah Penyebaran Covid-19	2.	Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Perbup No. 34/2020 tentang Penerapan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan & Pengendalian COVID-19 yang salah satunya telah mengatur pada sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menugasi DINBUDPAR untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pembukaan tempat-tempat wisata di kabupaten rembang untuk dapat menerapkan protokol Covid-19.
IV. FRAKSI PDI Perjuangan			
	1. Bantuan Sebesar Rp. 5 Miliar di PD. BPR BKK Lasem agar penyalurannya tepat sasaran, merata dan tidak diskriminasi. Dan Bantuan sebesar 1 Miliar kepada Pengusaha Batik sedangkan bantuan kepada UKM berupa bantuan bunga 4%	1.	Sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Demokrat-Hanura dan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera. Dalam penanganan Covid-19 Pemkab sangat berhati-hati karena telah menjadi perhatian dari berbagai pihak baik pada Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial sehingga atas bantuan untuk penanganan dampak ekonomi telah disusun draf peraturan bupati tentang penugasan kepada BPR BKK Lasem dan atas pemberiannya mengacu dengan beberapa ketentuan yaitu : penerima bantuan merupakan UKM yang dimiliki

			<p>oleh penduduk Kabupaten Rembang yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Rembang; UKM calon penerima pinjaman masuk dalam data base UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta wajib memiliki Ijin Usaha Mikro; dan Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau pemulihan dari usaha yang dilakukan sebelumnya sehingga tidak akan membeda-bedakan baik usaha kecil maupun usaha besar.</p>
V. FRAKSI Demokrat- Hanura			
	1.	Anggaran Urusan Wajib dianggarkan 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) bulan saja	1. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah melakukan penyesuaian atas kekurangan kebutuhan terutama berkaitan dengan SILTAP Perangkat Desa dan Honor Guru PAUD dan Madin.
	2.	Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Rembang	2. Kondisi kemiskinan Kabupaten Rembang sebelum adanya pandemi Covid-19, berdasarkan data kemiskinan dari BPS, perkembangan kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2015-2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 sebesar 19,28 % dan pada tahun 2019 adalah sebesar 14,95%. Dalam rangka percepatan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang dilakukan dengan:

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin absolute 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil. <p>Secara umum seluruh OPD yang berada di Kabupaten Rembang ikut andil dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Rembang, dimana keterlibatannya tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang.</p>	
VI. FRAKSI Karya Indonesia Sejahtera				
	1.	Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi turun yang semula Rp. 106.030.000.000,- menjadi Rp. 105.622.999.000	1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 407.001.000,- dikarenakan adanya surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/0010374 tanggal 3 Agustus 2020 perihal : Penyampaian Penyesuaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa. Sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyesuaikan atas target Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
	2.	Penjelasan atas pertanyaan dalam sidang DPRD Kabupaten Rembang tentang adanya PLT di beberapa OPD strategis.	2.	Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

		<p>Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2020.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengajukan ijin tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan proses penggantian pejabat sesuai ketentuan diatas, namun Menteri Dalam Negeri tidak memberikan persetujuan.</p> <p>Dalam rangka mematuhi ketentuan tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Rembang belum dapat melakukan proses kegiatan pengisian kekosongan jabatan dan memfokuskan diri untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian pandemi covid-19.</p> <p>Untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan pada jabatan yang kosong telah ditunjuk Pejabat pelaksana tugas.</p>
	<p>3. Terjadinya Kelangkaan Pupuk ZA di Kabupaten Rembang</p>	<p>3. Pupuk Subsidi khususnya ZA, kebutuhan Rembang 19.079 ton/tahun sesuai RDKK (Rencana definitif kebutuhan kelompok) sudah diajukan oleh Pemkab Rembang ke Pemerintah Pusat. Sedangkan Alokasi</p>

			<p>yg terealisasi dari Pemerintah Pusat hanya sebesar 8.200 ton sehingga masih banyak kekurangan, untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengajukan kembali tambahan sebesar 2.808 ton untuk tahun 2020 untuk mencukupi kebutuhan pupuk ZA di Kabupaten Rembang.</p>
	4.	Alokasi DID Sebesar RP. 13.415.171.000,-	<p>4. DID Sebesar RP. 13.415.171.000,- dialokasikan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 3.115.171.000,- 2. Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 9.993.000.000,- 3. Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 307.000.000,-

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 9 September 2020

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Selasa
Tanggal : 16 September 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
4. Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dilanjutkan Penandatanganan Persetujuan dan Penyerahan Keputusan DPRD;
5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.**
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Dan yang kami hormati

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho dan inayah-Nya, sehingga kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna Ketiga DPRD dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Rapat Paripurna ini merupakan rapat paripurna terakhir dari tiga rapat paripurna yang diagendakan dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum Rapat Paripurna Ketiga ini, adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna sebelumnya dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, baik Rapat Paripurna Pertama tanggal 8 September 2020 maupun Rapat Paripurna Kedua tanggal 9 September 2020, yaitu *dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.*

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 35 orang. Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Selanjutnya, dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.25 WIB, maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Sekretaris Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Pendapat Fraksi-Fraksi atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
5. Penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD ;
6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
7. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu Laporan Sekretaris Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran, disilahkan.

=== LAPORAN SEKRETARIS BADAN ANGGARAN ===

Terima kasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si atas penyampaiannya.

➤ ***(Laporan Sekretaris Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir)***

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdri. Siti Rizqiyah Putri DA

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Mahmudi
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdri. Frida Iriani
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo, S.H.
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Mugiyarto, S.T.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Agus Sutrisno

Selanjutnya, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

Nama Fraksi	Setuju	Setuju dg. Perubahan	Ditolak
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓		
Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ (*Pendapat Fraksi-Fraksi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Berdasarkan laporan dari Sekretaris Badan Anggaran maupun pendapat dari masing-masing Fraksi, dapat kita simpulkan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dapat disetujui , disetujui dengan perubahan ataupun ditolak.

Oleh karena dalam persetujuannya perlu pengambilan keputusan dari anggota DPRD secara lisan, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota yang hadir pada rapat paripurna hari ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

===== SETUJU/SETUJU DENGAN PENGUBAHAN/DITOLAK =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Atas dasar persetujuan dari anggota, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Rembang atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan sekaligus penyerahan keputusan DPRD kepada Bupati. Disilahkan.

**=== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD ===**

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita ikuti acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

==== **PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA** ====

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

➤ (*Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, TAPD Kabupaten Rembang, rekan-rekan Anggota Badan Anggaran, dan Sekretaris DPRD beserta seluruh staf yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

WAKIL KETUA ,



H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.

h SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

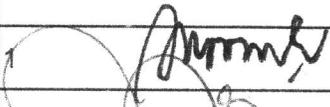
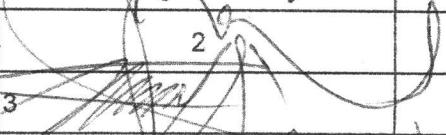
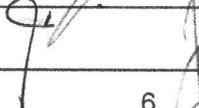
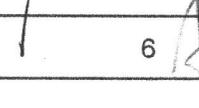
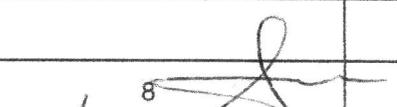
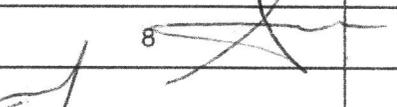
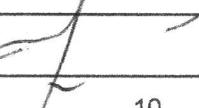
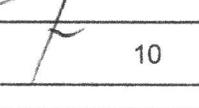
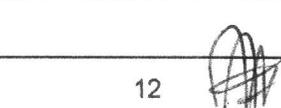
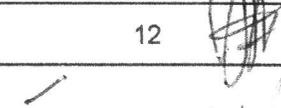
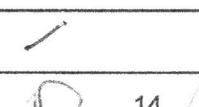
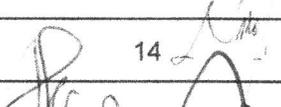
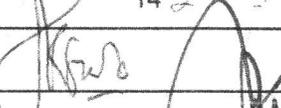
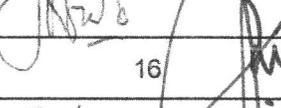
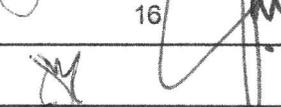
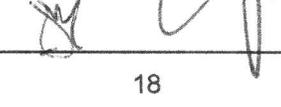
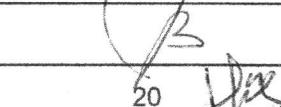
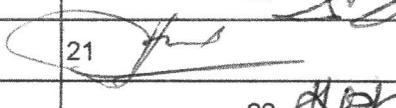
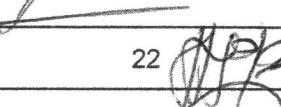
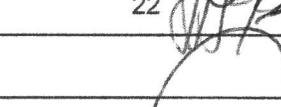
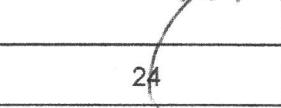
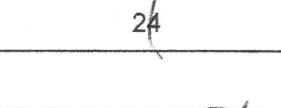
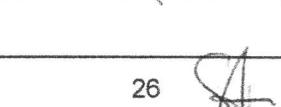
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2020 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

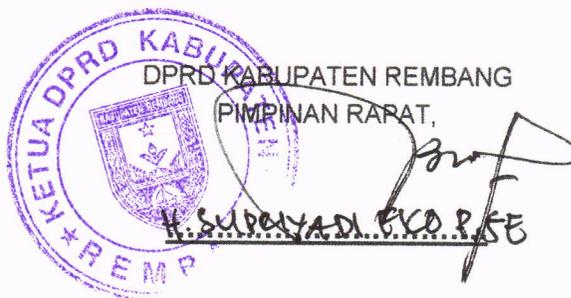
HARI/TANGGAL : RABU, 16 SEPTEMBER 2020
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	SUGIHARTO	Anggota		
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
3	SUMARDI	Anggota		
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota		
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota		
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
8	H. SUPADI	Anggota		
9	ABDUL ROUF	Anggota		
10				
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Plt. Ketua DPRD		
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota		
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota		

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35	
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36	
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37	
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40	
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41	
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42	
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43	
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44	
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45	

Keterangan :

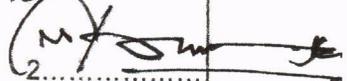
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

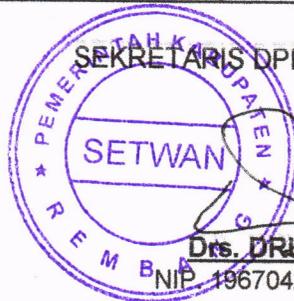


**DAFTAR HADIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

HARI/TANGGAL : RABU, 16 SEPTEMBER 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

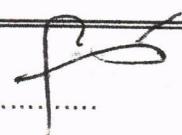
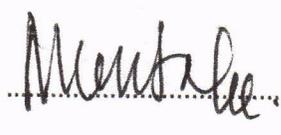
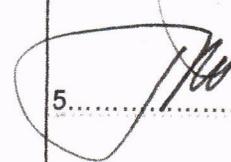
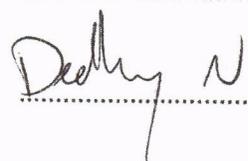
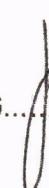
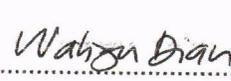
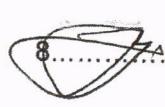
Drs. DRUPOBO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

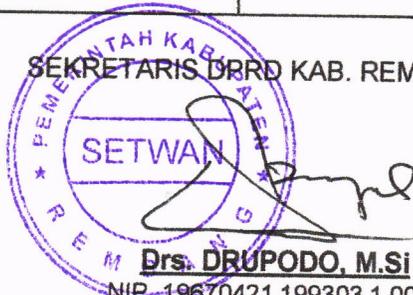
**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

HARI/TANGGAL : RABU, 16 SEPTEMBER 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	1. 
2	Asisten I Sekda	2.
3		Asisten II Sekda	3. 
4	Asisten III Sekda	4.
5		Ka. BPPKAD	5. 
6		an. Ka. BAPPEDA	6. 
7	Kabag. Hukum Setda	7.
8		Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8. 
9	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

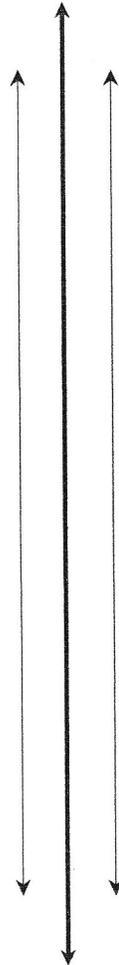

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**



**BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI RABU TANGGAL 16 SEPTEMBER
2020 MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebelum disepakati menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD;
2. bahwa hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomo 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peaturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peaturan Pemeintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
20. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/1822/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pengiriman Raperda;
21. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 7 September 2020 yang mengagendakan Penetapan Jadwal Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 pukul 14.00 WIB dengan agenda Penjelasan terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 pukul 15.50 WIB dengan agenda Strategi dan Distribusi Pembahasan Rancangan Perda tentang Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
- c. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD dan OPD Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pukul 12.40 WIB dengan agenda Pendalaman terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 pukul 11.20 WIB dengan agenda Pendalaman terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- e. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD dan OPD Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 pukul 11.15 WIB dengan agenda Sinkronisasi Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- f. Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 pukul 11.00 WIB dengan agenda Penyusunan Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN
RINGKASAN RAPBD PERUBAHAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4-3				
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	
1	PENDAPATAN	1,891,753,253,706.00	1,859,890,949,423.00	(31,862,304,283.00)	1,861,030,949,423.00	(30,722,304,283.00)	1,140,000,000.00	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	307,258,621,706.00	291,002,773,423.00	(16,255,848,283.00)	292,142,773,423.00	(15,115,848,283.00)	1,140,000,000.00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000.00	80,026,500,000.00	(20,495,750,000.00)	80,026,500,000.00	(20,495,750,000.00)	-	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,051,081,000.00	14,728,896,775.00	(8,322,184,225.00)	14,728,896,775.00	(8,322,184,225.00)	-	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000.00	10,840,309,000.00	-	10,840,309,000.00	-	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172,844,981,706.00	185,407,067,648.00	12,562,085,942.00	186,547,067,648.00	13,702,085,942.00	1,140,000,000.00	
1.2	Dana Perimbangan	1,118,646,021,000.00	1,021,651,523,000.00	(96,994,498,000.00)	1,021,651,523,000.00	(96,994,498,000.00)	-	
1.2.2	Dana Transfer Umum	854,512,647,000.00	787,373,341,000.00	(67,139,306,000.00)	787,373,341,000.00	(67,139,306,000.00)	-	
1.2.3	Dana Transfer Khusus	264,133,374,000.00	234,278,182,000.00	(29,855,192,000.00)	234,278,182,000.00	(29,855,192,000.00)	-	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	465,848,611,000.00	547,236,653,000.00	81,388,042,000.00	547,236,653,000.00	81,388,042,000.00	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00	66,256,175,000.00	61,256,175,000.00	66,256,175,000.00	61,256,175,000.00	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106,030,000,000.00	105,622,999,000.00	(407,001,000.00)	105,622,999,000.00	(407,001,000.00)	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	354,818,611,000.00	356,270,479,000.00	1,451,868,000.00	356,270,479,000.00	1,451,868,000.00	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	-	
2.	BELANJA	1,964,433,829,762.00	1,885,866,377,240.00	(78,567,452,522.00)	1,892,006,377,240.00	(72,427,452,522.00)	6,140,000,000.00	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,180,614,557,366.00	1,201,751,133,005.00	21,136,575,639.00	1,207,716,692,445.00	27,102,135,079.00	5,965,559,440.00	
2.1.1	Belanja Pegawai	698,334,578,666.00	646,236,339,515.00	(52,098,239,151.00)	645,866,898,955.00	(52,467,679,711.00)	(369,440,560.00)	
2.1.2	Belanja Bunga	1,631,632,000.00	1,631,632,000.00	-	1,631,632,000.00	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	
2.1.4	Belanja Hibah	81,476,375,000.00	87,502,210,000.00	6,025,835,000.00	87,144,210,000.00	5,667,835,000.00	(358,000,000.00)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,299,720,000.00	4,079,720,000.00	(4,220,000,000.00)	4,079,720,000.00	(4,220,000,000.00)	-	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,357,333,100.00	12,357,333,100.00	-	12,357,333,100.00	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	377,514,918,600.00	392,677,638,587.00	15,162,719,987.00	392,677,638,587.00	15,162,719,987.00	-	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	57,266,259,803.00	56,266,259,803.00	57,359,259,803.00	56,359,259,803.00	93,000,000.00	

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)				PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	
2.2	Belanja Langsung	783,819,272,396.00	684,115,244,235.00	(99,704,028,161.00)	684,289,684,795.00	(99,529,587,601.00)	174,440,560.00	
2.2.1	Belanja Pegawai	202,820,515,800.00	234,164,220,523.00	31,343,704,723.00	232,946,814,268.00	30,126,298,468.00	(1,217,406,255.00)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325,715,413,911.00	277,633,073,019.00	(48,082,340,892.00)	277,309,483,535.00	(48,405,930,376.00)	(323,589,484.00)	
2.2.3	Belanja Modal	255,283,342,685.00	172,317,950,693.00	(82,965,391,992.00)	174,033,386,992.00	(81,249,955,693.00)	1,715,436,299.00	
	Jumlah Belanja	1,964,433,829,762.00	1,885,866,377,240.00	(78,567,452,522.00)	1,892,006,377,240.00	(72,427,452,522.00)	6,140,000,000.00	
	surplus (devisit)	(72,680,576,056.00)	(25,975,427,817.00)	46,705,148,239.00	(30,975,427,817.00)	41,705,148,239.00	(5,000,000,000.00)	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	162,548,944,056.00	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82,548,944,056.00	40,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	40,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	-	80,000,000,000.00	-		
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	162,548,944,056.00	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	89,868,368,000.00	94,168,368,000.00	4,300,000,000.00	89,168,368,000.00	(700,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00	10,300,000,000.00	4,300,000,000.00	5,300,000,000.00	(700,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	83,868,368,000.00	83,868,368,000.00	-	83,868,368,000.00	-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	89,868,368,000.00	94,168,368,000.00	4,300,000,000.00	89,168,368,000.00	(700,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	
	Pembiayaan Netto	72,680,576,056.00	25,975,427,817.00	(46,705,148,239.00)	30,975,427,817.00	(41,705,148,239.00)	5,000,000,000.00	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan							

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2020

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	4	5	6	7
1	DINPENDIKPORA	20,000,000.00	400,960,782,000.00	89,177,869,800.00	490,138,651,800.00
2	DINAS KESEHATAN	48,955,694,000.00	55,214,600,000.00	123,750,741,245.00	178,965,341,245.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	113,000,000,000.00	29,015,637,000.00	119,237,212,000.00	148,252,849,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	8,860,233,000.00	89,512,836,000.00	98,373,069,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	5,464,697,000.00	20,025,350,250.00	25,490,047,250.00
6	SATPOL PP	-	6,651,942,000.00	5,826,158,800.00	12,478,100,800.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,384,926,000.00	1,530,000,000.00	2,914,926,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3,277,415,000.00	8,997,425,000.00	12,274,840,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	6,065,400,000.00	15,776,383,000.00	21,841,783,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	5,033,113,000.00	9,132,760,000.00	14,165,873,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000.00	12,648,870,000.00	39,380,000,000.00	52,028,870,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200,700,000.00	8,786,420,000.00	13,046,937,250.00	21,833,357,250.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,466,173,000.00	5,115,094,391.00	8,581,267,391.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,666,493,000.00	5,668,044,200.00	9,334,537,200.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,232,539,000.00	5,606,294,000.00	18,094,543,000.00	23,700,837,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362,000,000.00	2,727,639,000.00	6,140,700,000.00	8,868,339,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,019,000,000.00	2,844,838,000.00	12,256,725,000.00	15,101,563,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,941,772,000.00	1,710,000,000.00	4,651,772,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,500,000,000.00	3,854,847,000.00	21,997,996,750.00	25,852,843,750.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	4,000,000,000.00	10,485,564,666.00	21,861,841,250.00	32,347,405,916.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	20,848,163,000.00	-	20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	778,011,000.00	-	778,011,000.00
23	SETDA	175,000,000.00	16,256,782,000.00	-	16,256,782,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,860,260,000.00	47,209,899,000.00	52,070,159,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	6,509,067,000.00	8,099,398,000.00	14,608,465,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,353,730,000.00	900,481,000.00	3,254,211,000.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,319,037,000.00	1,160,228,000.00	3,479,265,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,160,219,000.00	995,698,000.00	3,155,917,000.00
29	KECAMATAN BULU	-	2,006,524,000.00	1,042,468,000.00	3,048,992,000.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,369,084,000.00	951,462,880.00	3,320,546,880.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,179,181,000.00	932,503,000.00	3,111,684,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,703,630,000.00	966,654,000.00	2,670,284,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,826,959,000.00	1,359,500,000.00	3,186,459,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,722,152,000.00	1,470,066,000.00	3,192,218,000.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,826,328,000.00	1,171,915,000.00	2,998,243,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,224,931,000.00	1,050,000,000.00	3,274,931,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	2,140,251,000.00	1,057,725,000.00	3,197,976,000.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,470,796,000.00	1,110,003,000.00	3,580,799,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,406,533,000.00	11,226,474,900.00	15,633,007,900.00
40	BAPPEDA	-	3,569,309,000.00	8,346,538,000.00	11,915,847,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,708,031,785,706.00	512,537,130,700.00	19,249,198,000.00	531,786,328,700.00
a	(SKPD)	123,537,153,706.00	30,257,152,000.00	19,249,198,000.00	49,506,350,000.00
b	(PPKD)	1,584,494,632,000.00	482,279,978,700.00	-	482,279,978,700.00
42	BKD	-	4,588,824,000.00	8,818,944,000.00	13,407,768,000.00
	JUMLAH	1,891,753,253,706.00	1,180,614,557,366.00	745,357,773,716.00	1,925,972,331,082.00

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2020

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINPENDIKPORA	7,500,000.00	375,562,510,000.00	140,321,005,725.00	515,883,515,725.00
2	DINAS KESEHATAN	50,035,432,600.00	53,389,729,000.00	123,521,648,666.00	176,911,377,666.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	130,000,000,000.00	28,354,395,000.00	136,576,008,734.00	164,930,403,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	620,000,000.00	8,090,727,000.00	66,534,676,266.00	74,625,403,266.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	769,000,000.00	5,046,148,000.00	7,574,598,573.00	12,620,746,573.00
6	SATPOL PP	-	6,210,856,000.00	3,612,717,856.00	9,823,573,856.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,173,591,000.00	878,068,708.00	2,051,659,708.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,959,056,000.00	4,035,976,708.00	6,995,032,708.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	4,399,585,000.00	11,226,591,708.00	15,626,176,708.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	4,693,397,000.00	2,788,813,367.00	7,482,210,367.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	72,921,000.00	11,572,316,000.00	20,476,971,170.00	32,049,287,170.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	120,420,000.00	8,172,401,000.00	4,782,961,531.00	12,955,362,531.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,276,137,000.00	3,582,723,696.00	6,858,860,696.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,377,251,000.00	3,597,721,128.00	6,974,972,128.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	828,197,000.00	5,024,669,000.00	13,289,254,247.00	18,313,923,247.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	360,000,000.00	2,467,013,000.00	3,157,043,000.00	5,624,056,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	239,000,000.00	2,627,934,000.00	8,628,453,708.00	11,256,387,708.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,718,690,000.00	732,766,708.00	3,451,456,708.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,936,103,600.00	3,593,089,000.00	12,111,760,418.00	15,704,849,418.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	2,961,442,373.00	9,929,958,000.00	7,718,651,258.00	17,648,609,258.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	20,848,163,000.00	-	20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	762,833,000.00	-	762,833,000.00
23	SETDA	76,000,000.00	14,446,431,000.00	-	14,446,431,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,475,630,000.00	25,114,651,440.00	29,590,281,440.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,954,886,091.00	5,319,965,905.00	11,274,851,996.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,201,057,000.00	708,200,600.00	2,909,257,600.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,133,276,424.00	692,074,400.00	2,825,350,824.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,030,115,000.00	737,670,800.00	2,767,785,800.00
29	KECAMATAN BULU	-	1,696,826,000.00	903,823,300.00	2,600,649,300.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,159,116,000.00	979,135,008.00	3,138,251,008.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	1,919,290,000.00	788,053,800.00	2,707,343,800.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,489,191,000.00	787,066,000.00	2,276,257,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,717,201,000.00	1,152,698,400.00	2,869,899,400.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,426,023,000.00	1,013,688,600.00	2,439,711,600.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,700,894,000.00	779,728,000.00	2,480,622,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,060,311,000.00	741,870,200.00	2,802,181,200.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	1,958,964,000.00	835,026,400.00	2,793,990,400.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,287,198,000.00	764,509,800.00	3,051,707,800.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,076,994,000.00	8,931,176,708.00	13,008,170,708.00
40	BAPPEDA	-	3,440,794,000.00	4,785,134,258.00	8,225,928,258.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,665,864,932,850.00	576,156,692,490.00	11,907,774,723.00	588,064,467,213.00
a	(SKPD)	96,976,756,850.00	20,641,899,000.00	11,907,774,723.00	32,549,673,723.00
b	(PPKD)	1,568,888,176,000.00	555,514,793,490.00	-	555,514,793,490.00
42	BKD	-	4,169,795,000.00	4,916,454,232.00	9,086,249,232.00
	JUMLAH	1,859,890,949,423.00	1,201,751,133,005.00	647,007,115,749.00	1,848,758,248,754.00

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2020

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINPENDIKPORA	(12,500,000.00)	(25,398,272,000.00)	51,143,135,925.00	25,744,863,925.00
2	DINAS KESEHATAN	1,079,738,600.00	(1,824,871,000.00)	(229,092,579.00)	(2,053,963,579.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	17,000,000,000.00	(661,242,000.00)	17,338,796,734.00	16,677,554,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(400,000,000.00)	(769,506,000.00)	(22,978,159,734.00)	(23,747,665,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(346,000,000.00)	(418,549,000.00)	(12,450,751,677.00)	(12,869,300,677.00)
6	SATPOL PP	-	(441,086,000.00)	(2,213,440,944.00)	(2,654,526,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(211,335,000.00)	(651,931,292.00)	(863,266,292.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(318,359,000.00)	(4,961,448,292.00)	(5,279,807,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(1,665,815,000.00)	(4,549,791,292.00)	(6,215,606,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	(339,716,000.00)	(6,343,946,633.00)	(6,683,662,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(48,614,000.00)	(1,076,554,000.00)	(18,903,028,830.00)	(19,979,582,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(80,280,000.00)	(614,019,000.00)	(8,263,975,719.00)	(8,877,994,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(190,036,000.00)	(1,532,370,695.00)	(1,722,406,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(289,242,000.00)	(2,070,323,072.00)	(2,359,565,072.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(404,342,000.00)	(581,625,000.00)	(4,805,288,753.00)	(5,386,913,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(2,000,000.00)	(260,626,000.00)	(2,983,657,000.00)	(3,244,283,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(780,000,000.00)	(216,904,000.00)	(3,628,271,292.00)	(3,845,175,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(223,082,000.00)	(977,233,292.00)	(1,200,315,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(4,563,896,400.00)	(261,758,000.00)	(9,886,236,332.00)	(10,147,994,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(1,038,557,627.00)	(555,606,666.00)	(14,143,189,992.00)	(14,698,796,658.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(15,178,000.00)	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	(99,000,000.00)	(1,810,351,000.00)	-	(1,810,351,000.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(384,630,000.00)	(22,095,247,560.00)	(22,479,877,560.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(554,180,909.00)	(2,779,432,095.00)	(3,333,613,004.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(152,673,000.00)	(192,280,400.00)	(344,953,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(185,760,576.00)	(468,153,600.00)	(653,914,176.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(130,104,000.00)	(258,027,200.00)	(388,131,200.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(309,698,000.00)	(138,644,700.00)	(448,342,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(209,968,000.00)	27,672,128.00	(182,295,872.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(259,891,000.00)	(144,449,200.00)	(404,340,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	(214,439,000.00)	(179,588,000.00)	(394,027,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(109,758,000.00)	(206,801,600.00)	(316,559,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(296,129,000.00)	(456,377,400.00)	(752,506,400.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(125,434,000.00)	(392,187,000.00)	(517,621,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(164,620,000.00)	(308,129,800.00)	(472,749,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(181,287,000.00)	(222,698,600.00)	(403,985,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(183,598,000.00)	(345,493,200.00)	(529,091,200.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(329,539,000.00)	(2,295,298,192.00)	(2,624,837,192.00)
40	BAPPEDA	-	(128,515,000.00)	(3,561,403,742.00)	(3,689,918,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(42,166,852,856.00)	63,619,561,790.00	(7,341,423,277.00)	56,278,138,513.00
a	(SKPD)	(26,560,396,856.00)	(9,615,253,000.00)	(7,341,423,277.00)	(16,956,676,277.00)
b	(PPKD)	(15,606,456,000.00)	73,234,814,790.00	-	73,234,814,790.00
42	BKD	-	(419,029,000.00)	(3,902,489,768.00)	(4,321,518,768.00)
	JUMLAH	(31,862,304,283.00)	21,136,575,639.00	(98,350,657,967.00)	(77,214,082,328.00)

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2020

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		JUMLAH		
1	2	16	17	18	19=17+18
1	DINPENDIKPORA	7,500,000.00	375,562,510,000.00	140,121,005,725.00	515,683,515,725.00
2	DINAS KESEHATAN	50,035,432,600.00	53,389,729,000.00	123,521,648,666.00	176,911,377,666.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	130,000,000,000.00	28,354,395,000.00	136,576,008,734.00	164,930,403,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	620,000,000.00	8,090,727,000.00	66,434,676,266.00	74,525,403,266.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	769,000,000.00	5,046,148,000.00	7,574,598,573.00	12,620,746,573.00
6	SATPOL PP	-	6,210,856,000.00	3,612,717,856.00	9,823,573,856.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,176,591,000.00	875,068,708.00	2,051,659,708.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,959,056,000.00	4,135,976,708.00	7,095,032,708.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	4,399,585,000.00	11,226,591,708.00	15,626,176,708.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	4,693,397,000.00	2,788,813,367.00	7,482,210,367.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	72,921,000.00	11,572,316,000.00	20,526,971,170.00	32,099,287,170.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	120,420,000.00	8,172,401,000.00	4,782,961,531.00	12,955,362,531.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,276,137,000.00	3,582,723,696.00	6,858,860,696.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,377,251,000.00	3,597,721,128.00	6,974,972,128.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	828,197,000.00	5,024,669,000.00	13,289,254,247.00	18,313,923,247.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	360,000,000.00	2,467,013,000.00	3,157,043,000.00	5,624,056,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	239,000,000.00	2,627,934,000.00	8,628,453,708.00	11,256,387,708.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,718,690,000.00	732,766,708.00	3,451,456,708.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,936,103,600.00	3,593,089,000.00	12,111,760,418.00	15,704,849,418.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	2,961,442,373.00	9,929,958,000.00	7,748,651,258.00	17,678,609,258.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	20,475,722,440.00	-	20,475,722,440.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	762,833,000.00	-	762,833,000.00
23	SETDA	10,916,309,000.00	14,446,431,000.00	-	14,446,431,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,475,630,000.00	25,387,092,000.00	29,862,722,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,954,886,091.00	5,319,965,905.00	11,274,851,996.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,201,057,000.00	708,200,600.00	2,909,257,600.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,133,276,424.00	692,074,400.00	2,825,350,824.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,030,115,000.00	737,670,800.00	2,767,785,800.00
29	KECAMATAN BULU	-	1,696,826,000.00	903,823,300.00	2,600,649,300.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,159,116,000.00	964,135,008.00	3,123,251,008.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	1,919,290,000.00	788,053,800.00	2,707,343,800.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,489,191,000.00	787,066,000.00	2,276,257,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,717,201,000.00	1,152,698,400.00	2,869,899,400.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,426,023,000.00	1,013,688,600.00	2,439,711,600.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,700,894,000.00	779,728,000.00	2,480,622,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,060,311,000.00	741,870,200.00	2,802,181,200.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	1,958,964,000.00	835,026,400.00	2,793,990,400.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,287,198,000.00	764,509,800.00	3,051,707,800.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,076,994,000.00	8,931,176,708.00	13,008,170,708.00
40	BAPPEDA	-	3,440,794,000.00	4,785,134,258.00	8,225,928,258.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,656,164,623,850.00	582,491,692,490.00	11,907,774,723.00	594,399,467,213.00
a	(SKPD)	87,276,447,850.00	20,641,899,000.00	11,907,774,723.00	32,549,673,723.00
b	(PPKD)	1,568,888,176,000.00	561,849,793,490.00	-	561,849,793,490.00
42	BKD	-	4,169,795,000.00	4,916,454,232.00	9,086,249,232.00
	JUMLAH	1,861,030,949,423.00	1,207,716,692,445.00	647,141,556,309.00	1,854,858,248,754.00

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
2020

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		JUMLAH		
1	2	20=16-4	21=17-5	22=18-6	23=21+22
1	DINPENDIKPORA	(12,500,000.00)	(25,398,272,000.00)	50,943,135,925.00	25,544,863,925.00
2	DINAS KESEHATAN	1,079,738,600.00	(1,824,871,000.00)	(229,092,579.00)	(2,053,963,579.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	17,000,000,000.00	(661,242,000.00)	17,338,796,734.00	16,677,554,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(400,000,000.00)	(769,506,000.00)	(23,078,159,734.00)	(23,847,665,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(346,000,000.00)	(418,549,000.00)	(12,450,751,677.00)	(12,869,300,677.00)
6	SATPOL PP	-	(441,086,000.00)	(2,213,440,944.00)	(2,654,526,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(208,335,000.00)	(654,931,292.00)	(863,266,292.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(318,359,000.00)	(4,861,448,292.00)	(5,179,807,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(1,665,815,000.00)	(4,549,791,292.00)	(6,215,606,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	(339,716,000.00)	(6,343,946,633.00)	(6,683,662,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(48,614,000.00)	(1,076,554,000.00)	(18,853,028,830.00)	(19,929,582,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(80,280,000.00)	(614,019,000.00)	(8,263,975,719.00)	(8,877,994,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(190,036,000.00)	(1,532,370,695.00)	(1,722,406,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(289,242,000.00)	(2,070,323,072.00)	(2,359,565,072.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(404,342,000.00)	(581,625,000.00)	(4,805,288,753.00)	(5,386,913,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(2,000,000.00)	(260,626,000.00)	(2,983,657,000.00)	(3,244,283,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(780,000,000.00)	(216,904,000.00)	(3,628,271,292.00)	(3,845,175,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(223,082,000.00)	(977,233,292.00)	(1,200,315,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(4,563,896,400.00)	(261,758,000.00)	(9,886,236,332.00)	(10,147,994,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(1,038,557,627.00)	(555,606,666.00)	(14,113,189,992.00)	(14,668,796,658.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(372,440,560.00)	-	(372,440,560.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(15,178,000.00)	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	10,741,309,000.00	(1,810,351,000.00)	-	(1,810,351,000.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(384,630,000.00)	(21,822,807,000.00)	(22,207,437,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(554,180,909.00)	(2,779,432,095.00)	(3,333,613,004.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(152,673,000.00)	(192,280,400.00)	(344,953,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(185,760,576.00)	(468,153,600.00)	(653,914,176.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(130,104,000.00)	(258,027,200.00)	(388,131,200.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(309,698,000.00)	(138,644,700.00)	(448,342,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(209,968,000.00)	12,672,128.00	(197,295,872.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(259,891,000.00)	(144,449,200.00)	(404,340,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	(214,439,000.00)	(179,588,000.00)	(394,027,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(109,758,000.00)	(206,801,600.00)	(316,559,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(296,129,000.00)	(456,377,400.00)	(752,506,400.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(125,434,000.00)	(392,187,000.00)	(517,621,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(164,620,000.00)	(308,129,800.00)	(472,749,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(181,287,000.00)	(222,698,600.00)	(403,985,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(183,598,000.00)	(345,493,200.00)	(529,091,200.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(329,539,000.00)	(2,295,298,192.00)	(2,624,837,192.00)
40	BAPPEDA	-	(128,515,000.00)	(3,561,403,742.00)	(3,689,918,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(51,867,161,856.00)	69,954,561,790.00	(7,341,423,277.00)	62,613,138,513.00
a	(SKPD)	(36,260,705,856.00)	(9,615,253,000.00)	(7,341,423,277.00)	(16,956,676,277.00)
b	(PPKD)	(15,606,456,000.00)	79,569,814,790.00	-	79,569,814,790.00
42	BKD	-	(419,029,000.00)	(3,902,489,768.00)	(4,321,518,768.00)
	JUMLAH	(30,722,304,283.00)	27,102,135,079.00	(98,216,217,407.00)	(71,114,082,328.00)

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2020

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	24=16-8	25=17-9	26=18-10	27=25+26
1	DINPENDIKPORA	-	-	(200,000,000.00)	(200,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	(100,000,000.00)	(100,000,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-
6	SATPOL PP	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(372,440,560.00)	-	(372,440,560.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	10,840,309,000.00	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	272,440,560.00	272,440,560.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(9,700,309,000.00)	6,335,000,000.00	-	6,335,000,000.00
a	(SKPD)	(9,700,309,000.00)	-	-	-
b	(PPKD)	-	6,335,000,000.00	-	6,335,000,000.00
42	BKD	-	-	-	-
	JUMLAH	1,140,000,000.00	5,965,559,440.00	134,440,560.00	6,100,000,000.00

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		SEBELUM PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=+3+4+5+6
1	DINPENDIKPORA		20,000,000			20,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN		1,452,830,000.00		47,502,864,000.00	48,955,694,000.00
3	RSU R. SOETRASNO				113,000,000,000.00	113,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1,000,000,000.00		20,000,000.00	1,020,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1,115,000,000.00			1,115,000,000.00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		-			-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121,535,000.00			121,535,000.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		200,700,000.00			200,700,000.00
9	DINAS PERHUBUNGAN		1,232,539,000.00			1,232,539,000.00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		362,000,000.00			362,000,000.00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1,019,000,000.00			1,019,000,000.00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12,154,741,000.00		345,259,000.00	12,500,000,000.00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3,997,736,000.00		2,264,000.00	4,000,000,000.00
14	SEKRETARIAT DAERAH		175,000,000.00			175,000,000.00
	Bag. Umum		175,000,000			175,000,000.00
	Bag. Administrasi Perekonomian					-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas					-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	100,522,250,000	200,000,000	10,840,309,000	11,974,594,706	123,537,153,706.00
	JUMLAH	100,522,250,000.00	23,051,081,000.00	10,840,309,000.00	172,844,981,706.00	307,258,621,706.00

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		SETELAH PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINPENDIKPORA		7,500,000			7,500,000.00
2	DINAS KESEHATAN		1,452,830,000.00		48,582,602,600.00	50,035,432,600.00
3	RSU R. SOETRASNO				130,000,000,000.00	130,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		600,000,000.00		20,000,000.00	620,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		769,000,000.00			769,000,000.00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		-			-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		72,921,000.00			72,921,000.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		120,420,000.00			120,420,000.00
9	DINAS PERHUBUNGAN		821,691,600.00		6,505,400.00	828,197,000.00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		360,000,000.00			360,000,000.00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		239,000,000.00			239,000,000.00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		7,590,844,600.00		345,259,000.00	7,936,103,600.00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		2,498,689,575.00		462,752,798.00	2,961,442,373.00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	76,000,000.00	-	-	76,000,000.00
	Bag. Umum		76,000,000			76,000,000.00
	Bag. Administrasi Perekonomian					-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		-			-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	80,026,500,000	120,000,000	10,840,309,000	5,989,947,850.00	96,976,756,850.00
	JUMLAH	80,026,500,000.00	14,728,896,775.00	10,840,309,000.00	185,407,067,648.00	291,002,773,423.00

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	DINPENDIKPORA	-	(12,500,000.00)	-	-	(12,500,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	1,079,738,600.00	1,079,738,600.00
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	(400,000,000.00)	-	-	(400,000,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	(346,000,000.00)	-	-	(346,000,000.00)
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	(48,614,000.00)	-	-	(48,614,000.00)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(80,280,000.00)	-	-	(80,280,000.00)
9	DINAS PERHUBUNGAN	-	(410,847,400.00)	-	6,505,400.00	(404,342,000.00)
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	(2,000,000.00)	-	-	(2,000,000.00)
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	(780,000,000.00)	-	-	(780,000,000.00)
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	(4,563,896,400.00)	-	-	(4,563,896,400.00)
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	(1,499,046,425.00)	-	460,488,798.00	(1,038,557,627.00)
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	(99,000,000.00)	-	-	(99,000,000.00)
	Bag. Umum	-	(99,000,000.00)	-	-	(99,000,000.00)
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	(20,495,750,000.00)	(80,000,000.00)	-	(5,984,646,856.00)	(26,560,396,856.00)
	JUMLAH	(20,495,750,000.00)	(8,322,184,225.00)	-	12,562,085,942.00	(16,255,848,283.00)

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22=18+19+20+21
1	DINPENDIKPORA		7,500,000			7,500,000.00
2	DINAS KESEHATAN		1,452,830,000.00		48,582,602,600.00	50,035,432,600.00
3	RSU R. SOETRASNO				130,000,000,000.00	130,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		600,000,000.00		20,000,000.00	620,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		769,000,000.00			769,000,000.00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		-			-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		72,921,000.00			72,921,000.00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		120,420,000.00			120,420,000.00
9	DINAS PERHUBUNGAN		821,691,600.00		6,505,400.00	828,197,000.00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		360,000,000.00			360,000,000.00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		239,000,000.00			239,000,000.00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		7,590,844,600.00		345,259,000.00	7,936,103,600.00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		2,498,689,575.00		462,752,798.00	2,961,442,373.00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	76,000,000.00	10,840,309,000.00	-	10,916,309,000.00
	Bag. Umum		76,000,000			76,000,000.00
	Bag. Administrasi Perekonomian			10,840,309,000		10,840,309,000.00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		-			-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	80,026,500,000	120,000,000		7,129,947,850.00	87,276,447,850.00
	JUMLAH	80,026,500,000.00	14,728,896,775.00	10,840,309,000.00	186,547,067,648.00	292,142,773,423.00

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	23=18-3	24=19-4	25=20-5	26=21-6	27=23+24+25+26
1	DINPENDIKPORA	-	(12,500,000.00)	-	-	(12,500,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	1,079,738,600.00	1,079,738,600.00
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	(400,000,000.00)	-	-	(400,000,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	(346,000,000.00)	-	-	(346,000,000.00)
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	(48,614,000.00)	-	-	(48,614,000.00)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(80,280,000.00)	-	-	(80,280,000.00)
9	DINAS PERHUBUNGAN	-	(410,847,400.00)	-	6,505,400.00	(404,342,000.00)
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	(2,000,000.00)	-	-	(2,000,000.00)
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	(780,000,000.00)	-	-	(780,000,000.00)
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	(4,563,896,400.00)	-	-	(4,563,896,400.00)
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	(1,499,046,425.00)	-	460,488,798.00	(1,038,557,627.00)
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	(99,000,000.00)	10,840,309,000.00	-	10,741,309,000.00
	Bag. Umum	-	(99,000,000.00)	-	-	(99,000,000.00)
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	10,840,309,000.00	-	10,840,309,000.00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	(20,495,750,000.00)	(80,000,000.00)	(10,840,309,000.00)	(4,844,646,856.00)	(36,260,705,856.00)
	JUMLAH	(20,495,750,000.00)	(8,322,184,225.00)	-	13,702,085,942.00	(15,115,848,283.00)

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	28=18-8	29=19-9	30=20-10	31=21-11	32
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
9	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	10,840,309,000.00	-	10,840,309,000.00
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	10,840,309,000.00	-	10,840,309,000.00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	-	-	(10,840,309,000.00)	1,140,000,000.00	(9,700,309,000.00)
	JUMLAH	-	-	-	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)								
		SEBELUM PERUBAHAN								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9	
1	DINPENDIKPORA	400,960,782,000.00								400,960,782,000.00
2	DINAS KESEHATAN	55,214,600,000.00								55,214,600,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	29,015,637,000.00								29,015,637,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,860,233,000.00								8,860,233,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,464,697,000.00								5,464,697,000.00
6	SATPOL PP	6,651,942,000.00								6,651,942,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,384,926,000.00								1,384,926,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,277,415,000.00								3,277,415,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,065,400,000.00								6,065,400,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,033,113,000.00								5,033,113,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,648,870,000.00								12,648,870,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,786,420,000.00								8,786,420,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,466,173,000.00								3,466,173,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,666,493,000.00								3,666,493,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,606,294,000.00								5,606,294,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,727,639,000.00								2,727,639,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,844,838,000.00								2,844,838,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,941,772,000.00								2,941,772,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,854,847,000.00								3,854,847,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	10,485,564,666.00								10,485,564,666.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00								20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	778,011,000.00								778,011,000.00
23	SETDA	16,256,782,000.00								16,256,782,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,860,260,000.00								4,860,260,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	6,509,067,000.00								6,509,067,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,353,730,000.00								2,353,730,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2,319,037,000.00								2,319,037,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,160,219,000.00								2,160,219,000.00
29	KECAMATAN BULU	2,006,524,000.00								2,006,524,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,369,084,000.00								2,369,084,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,179,181,000.00								2,179,181,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,703,630,000.00								1,703,630,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,826,959,000.00								1,826,959,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,722,152,000.00								1,722,152,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,826,328,000.00								1,826,328,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,224,931,000.00								2,224,931,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	2,140,251,000.00								2,140,251,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,470,796,000.00								2,470,796,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,406,533,000.00								4,406,533,000.00
40	BAPPEDA	3,569,309,000.00								3,569,309,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30,257,152,000.00	1,631,632,000.00	-	12,357,333,100.00	81,476,375,000.00	8,299,720,000.00	377,514,918,600.00	1,000,000,000.00	512,537,130,700.00
a	(SKPD)	30,257,152,000.00								
b	(PPKD)		1,631,632,000.00							30,257,152,000.00
42	BKD	4,588,824,000.00								482,279,978,700.00
	JUMLAH	698,334,578,666.00	1,631,632,000.00	-	12,357,333,100.00	81,476,375,000.00	8,299,720,000.00	377,514,918,600.00	1,000,000,000.00	1,180,614,557,366.00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)								
		SETELAH PERUBAHAN								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
11	12		13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17		
1	DINPENDIKPORA	375,562,510,000.00								375,562,510,000.00
2	DINAS KESEHATAN	53,389,729,000.00								53,389,729,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28,354,395,000.00								28,354,395,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,090,727,000.00								8,090,727,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,046,148,000.00								5,046,148,000.00
6	SATPOL PP	6,210,856,000.00								6,210,856,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,173,591,000.00								1,173,591,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,959,056,000.00								2,959,056,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,399,585,000.00								4,399,585,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,693,397,000.00								4,693,397,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,572,316,000.00								11,572,316,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,172,401,000.00								8,172,401,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,276,137,000.00								3,276,137,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,377,251,000.00								3,377,251,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,024,669,000.00								5,024,669,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,467,013,000.00								2,467,013,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,627,934,000.00								2,627,934,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,718,690,000.00								2,718,690,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,593,089,000.00								3,593,089,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	9,929,958,000.00								9,929,958,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00								20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,833,000.00								762,833,000.00
23	SETDA	14,446,431,000.00								14,446,431,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,475,630,000.00								4,475,630,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,954,886,091.00								5,954,886,091.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,201,057,000.00								2,201,057,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2,133,276,424.00								2,133,276,424.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,030,115,000.00								2,030,115,000.00
29	KECAMATAN BULU	1,696,826,000.00								1,696,826,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,159,116,000.00								2,159,116,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,919,290,000.00								1,919,290,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,489,191,000.00								1,489,191,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,717,201,000.00								1,717,201,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,426,023,000.00								1,426,023,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,700,894,000.00								1,700,894,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,060,311,000.00								2,060,311,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,958,964,000.00								1,958,964,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,287,198,000.00								2,287,198,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,076,994,000.00								4,076,994,000.00
40	BAPPEDA	3,440,794,000.00								3,440,794,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20,641,899,000.00	1,631,632,000.00	-	12,357,333,100.00	87,502,210,000.00	4,079,720,000.00	392,677,638,587.00	57,266,259,803.00	576,156,692,490.00
a	(SKPD)	20,641,899,000.00								20,641,899,000.00
b	(PPKD)		1,631,632,000.00							1,631,632,000.00
42	BKD	4,169,795,000.00								4,169,795,000.00
	JUMLAH	646,236,339,515.00	1,631,632,000.00	-	12,357,333,100.00	87,502,210,000.00	4,079,720,000.00	392,677,638,587.00	57,266,259,803.00	1,201,751,133,005.00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH (BERKURANG)								JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4		21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26=19+20+21+22+23+ 24+25
1	DINPENDIKPORA	(25,398,272,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(25,398,272,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	(1,824,871,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(1,824,871,000.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(661,242,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(661,242,000.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(769,506,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(769,506,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(418,549,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(418,549,000.00)
6	SATPOL PP	(441,086,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(441,086,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(211,335,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(211,335,000.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(318,359,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(318,359,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(1,665,815,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(1,665,815,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(339,716,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(339,716,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1,076,554,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(1,076,554,000.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(814,019,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(814,019,000.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	(190,038,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(190,038,000.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(289,242,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(289,242,000.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(581,825,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(581,825,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(260,626,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(260,626,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(216,904,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(216,904,000.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(223,082,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(223,082,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(261,758,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(261,758,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(555,606,666.00)	-	-	-	-	-	-	-	(555,606,666.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(15,178,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	(1,810,351,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(1,810,351,000.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(384,630,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(384,630,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(554,180,909.00)	-	-	-	-	-	-	-	(554,180,909.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(152,673,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(152,673,000.00)
27	KECAMATAN SULANG	(185,760,576.00)	-	-	-	-	-	-	-	(185,760,576.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(130,104,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(130,104,000.00)
29	KECAMATAN BULU	(309,698,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(309,698,000.00)
30	KECAMATAN LASEM	(209,968,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(209,968,000.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(259,891,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(259,891,000.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(214,439,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(214,439,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(109,758,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(109,758,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(296,129,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(296,129,000.00)
35	KECAMATAN SALE	(125,434,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(125,434,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(164,620,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(164,620,000.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(181,287,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(181,287,000.00)
38	KECAMATAN SARANG	(183,598,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(183,598,000.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(329,539,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(329,539,000.00)
40	BAPPEDA	(128,515,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(128,515,000.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(9,615,253,000.00)	-	-	-	6,025,835,000.00	(4,220,000,000.00)	15,162,719,987.00	56,266,259,803.00	63,619,561,790.00
a	(SKPD)	(9,615,253,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(9,615,253,000.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	BKD	(419,029,000.00)	-	-	-	6,025,835,000.00	(4,220,000,000.00)	15,162,719,987.00	56,266,259,803.00	73,234,814,790.00
	JUMLAH	(52,098,239,151.00)	-	-	-	6,025,835,000.00	(4,220,000,000.00)	15,162,719,987.00	56,266,259,803.00	21,136,576,639.00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN PERSETUJUAN								JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	27	28		29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33
1	DINPENDIKPORA	375,562,510,000.00								375,562,510,000.00
2	DINAS KESEHATAN	53,389,729,000.00								53,389,729,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28,354,395,000.00								28,354,395,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,090,727,000.00								8,090,727,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,046,148,000.00								5,046,148,000.00
6	SATPOL PP	6,210,856,000.00								6,210,856,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,176,591,000.00								1,176,591,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,959,056,000.00								2,959,056,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,399,585,000.00								4,399,585,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,693,397,000.00								4,693,397,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,572,316,000.00								11,572,316,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,172,401,000.00								8,172,401,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,276,137,000.00								3,276,137,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,377,251,000.00								3,377,251,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,024,669,000.00								5,024,669,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,467,013,000.00								2,467,013,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	2,627,934,000.00								2,627,934,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,718,690,000.00								2,718,690,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,593,089,000.00								3,593,089,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	9,929,958,000.00								9,929,958,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,475,722,440.00								20,475,722,440.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,833,000.00								762,833,000.00
23	SETDA	14,446,431,000.00								14,446,431,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,475,630,000.00								4,475,630,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,954,886,091.00								5,954,886,091.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,201,057,000.00								2,201,057,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2,133,276,424.00								2,133,276,424.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,030,115,000.00								2,030,115,000.00
29	KECAMATAN BULU	1,696,826,000.00								1,696,826,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,159,116,000.00								2,159,116,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,919,290,000.00								1,919,290,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,489,191,000.00								1,489,191,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,717,201,000.00								1,717,201,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,426,023,000.00								1,426,023,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,700,894,000.00								1,700,894,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,060,311,000.00								2,060,311,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,958,964,000.00								1,958,964,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,287,198,000.00								2,287,198,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,076,994,000.00								4,076,994,000.00
40	BAPPEDA	3,440,794,000.00								3,440,794,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20,641,899,000.00	1,631,632,000.00	6,600,000,000.00	12,357,333,100.00	87,144,210,000.00	4,079,720,000.00	392,677,638,587.00	57,359,259,803.00	582,491,692,490.00
a	(SKPD)	20,641,899,000.00								20,641,899,000.00
b	(PPKD)		1,631,632,000.00	6,600,000,000.00	12,357,333,100.00	87,144,210,000.00	4,079,720,000.00	392,677,638,587.00	57,359,259,803.00	561,849,793,490.00
42	BKD	4,169,795,000.00								4,169,795,000.00
	JUMLAH	645,856,898,955.00	1,631,632,000.00	6,600,000,000.00	12,357,333,100.00	87,144,210,000.00	4,079,720,000.00	392,677,638,587.00	57,359,259,803.00	1,207,716,692,445.00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN								Jumlah
		BERTAMBAH (BERKURANG)								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	35 = 27-3	36 = 28-4		37 = 29-5	38 = 30-6	39 = 31-7	40 = 32-8	41 = 33-9	42 = 35+36+37+38+39+40+ 41
1	DINPENDIKPORA	(25,398,272,000.00)	-		-	-	-	-	-	(25,398,272,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	(1,824,871,000.00)	-		-	-	-	-	-	(1,824,871,000.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(661,242,000.00)	-		-	-	-	-	-	(661,242,000.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(769,506,000.00)	-		-	-	-	-	-	(769,506,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(418,549,000.00)	-		-	-	-	-	-	(418,549,000.00)
6	SATPOL PP	(441,086,000.00)	-		-	-	-	-	-	(441,086,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(208,335,000.00)	-		-	-	-	-	-	(208,335,000.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(318,359,000.00)	-		-	-	-	-	-	(318,359,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(1,665,815,000.00)	-		-	-	-	-	-	(1,665,815,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(339,716,000.00)	-		-	-	-	-	-	(339,716,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1,076,554,000.00)	-		-	-	-	-	-	(1,076,554,000.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(614,019,000.00)	-		-	-	-	-	-	(614,019,000.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(190,036,000.00)	-		-	-	-	-	-	(190,036,000.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(289,242,000.00)	-		-	-	-	-	-	(289,242,000.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(581,625,000.00)	-		-	-	-	-	-	(581,625,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(260,626,000.00)	-		-	-	-	-	-	(260,626,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(216,904,000.00)	-		-	-	-	-	-	(216,904,000.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(223,082,000.00)	-		-	-	-	-	-	(223,082,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(261,758,000.00)	-		-	-	-	-	-	(261,758,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(555,608,666.00)	-		-	-	-	-	-	(555,608,666.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(372,440,560.00)	-		-	-	-	-	-	(372,440,560.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(15,178,000.00)	-		-	-	-	-	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	(1,810,351,000.00)	-		-	-	-	-	-	(1,810,351,000.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(384,630,000.00)	-		-	-	-	-	-	(384,630,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(554,180,909.00)	-		-	-	-	-	-	(554,180,909.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(152,673,000.00)	-		-	-	-	-	-	(152,673,000.00)
27	KECAMATAN SULANG	(185,760,576.00)	-		-	-	-	-	-	(185,760,576.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(130,104,000.00)	-		-	-	-	-	-	(130,104,000.00)
29	KECAMATAN BULU	(309,698,000.00)	-		-	-	-	-	-	(309,698,000.00)
30	KECAMATAN LASEM	(209,968,000.00)	-		-	-	-	-	-	(209,968,000.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(259,891,000.00)	-		-	-	-	-	-	(259,891,000.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(214,439,000.00)	-		-	-	-	-	-	(214,439,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(109,758,000.00)	-		-	-	-	-	-	(109,758,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(296,129,000.00)	-		-	-	-	-	-	(296,129,000.00)
35	KECAMATAN SALE	(125,434,000.00)	-		-	-	-	-	-	(125,434,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(164,620,000.00)	-		-	-	-	-	-	(164,620,000.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(181,287,000.00)	-		-	-	-	-	-	(181,287,000.00)
38	KECAMATAN SARANG	(183,598,000.00)	-		-	-	-	-	-	(183,598,000.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(329,539,000.00)	-		-	-	-	-	-	(329,539,000.00)
40	BAPPEDA	(128,515,000.00)	-		-	-	-	-	-	(128,515,000.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(9,615,253,000.00)	-	6,600,000,000.00	-	5,667,835,000.00	(4,220,000,000.00)	15,162,719,987.00	56,359,259,803.00	69,954,561,790.00
a	(SKPD)	(9,615,253,000.00)	-		-	-	-	-	-	(9,615,253,000.00)
b	(PPKD)		-	6,600,000,000.00	-	5,667,835,000.00	(4,220,000,000.00)	15,162,719,987.00	56,359,259,803.00	79,569,814,790.00
42	BKD	(419,029,000.00)	-		-	-	-	-	-	(419,029,000.00)
	JUMLAH	(52,457,679,711.00)	-	6,600,000,000.00	-	5,667,835,000.00	(4,220,000,000.00)	15,162,719,987.00	56,359,259,803.00	27,102,136,079.00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN								JUMLAH
		BERTAMBAH (BERKURANG)								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	43 = 27-11	44 = 28-12		45 = 29-13	46 = 30-14	47 = 31-15	48 = 32-16	49 = 33-17	50 = 43+44+45+46+47+48+49
1	DINPENDIKPORA	-	-		-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-		-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-		-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-		-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-		-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	-	-		-	-	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,000,000.00	-		-	-	-	-	-	3,000,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-		-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-		-	-	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-		-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-		-	-	-	-	-	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-		-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-		-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-		-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-		-	-	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-		-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-		-	-	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-		-	-	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-		-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-		-	-	-	-	-	-
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(372,440,560.00)	-		-	-	-	-	-	(372,440,560.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-		-	-	-	-	-	-
23	SETDA	-	-		-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-		-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	-	-		-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-		-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-		-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-		-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-		-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-		-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-		-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-		-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-		-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-		-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-		-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-		-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-		-	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-		-	-	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-		-	-	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-		-	-	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	6,600,000,000.00	-	(358,000,000.00)	-	-	93,000,000.00	6,335,000,000.00
a	(SKPD)	-	-		-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	6,600,000,000.00	-	(358,000,000.00)	-	-	93,000,000.00	6,335,000,000.00
42	BKD	-	-		-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	(369,440,560.00)	-	6,600,000,000.00	-	(358,000,000.00)	-	-	93,000,000.00	5,965,559,440.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINPENDIKPORA	28,048,915,000.00	18,052,141,060.00	43,076,813,740.00	89,177,869,800.00
2	DINAS KESEHATAN	37,916,840,540.00	57,010,875,235.00	28,823,025,470.00	123,750,741,245.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	46,069,151,000.00	42,579,574,000.00	30,588,487,000.00	119,237,212,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9,102,747,000.00	16,202,253,000.00	64,207,836,000.00	89,512,836,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2,213,835,000.00	4,717,071,250.00	13,094,444,000.00	20,025,350,250.00
6	SATPOL PP	2,773,152,000.00	1,704,969,100.00	1,348,037,700.00	5,826,158,800.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	791,812,000.00	701,649,100.00	36,538,900.00	1,530,000,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,100,720,000.00	2,963,571,300.00	4,933,133,700.00	8,997,425,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5,287,284,000.00	9,051,829,000.00	1,437,270,000.00	15,776,383,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,401,840,000.00	2,970,050,645.00	4,760,869,355.00	9,132,760,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,199,600,000.00	29,894,939,165.00	7,285,460,835.00	39,380,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,397,062,750.00	4,161,307,600.00	5,488,566,900.00	13,046,937,250.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,238,470,000.00	2,779,274,391.00	1,097,350,000.00	5,115,094,391.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,885,489,000.00	3,384,370,960.00	398,184,240.00	5,668,044,200.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,520,319,000.00	12,042,295,710.00	4,531,928,290.00	18,094,543,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,170,259,000.00	2,568,436,000.00	2,402,005,000.00	6,140,700,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,145,462,000.00	8,633,698,000.00	2,477,565,000.00	12,256,725,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	547,510,000.00	1,122,490,000.00	40,000,000.00	1,710,000,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,417,112,760.00	4,442,738,040.00	13,138,145,950.00	21,997,996,750.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,569,191,950.00	10,188,987,075.00	8,103,662,225.00	21,861,841,250.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	18,179,540,000.00	16,736,670,180.00	3,545,288,500.00	38,461,498,680.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,899,084,800.00	42,454,124,200.00	2,856,690,000.00	47,209,899,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	2,474,802,000.00	2,083,000,470.00	3,541,595,530.00	8,099,398,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	419,630,000.00	463,151,000.00	17,700,000.00	900,481,000.00
27	KECAMATAN SULANG	473,844,000.00	655,384,000.00	31,000,000.00	1,160,228,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	396,930,000.00	458,768,000.00	140,000,000.00	995,698,000.00
29	KECAMATAN BULU	675,350,000.00	352,118,000.00	15,000,000.00	1,042,468,000.00
30	KECAMATAN LASEM	407,220,000.00	522,876,880.00	21,366,000.00	951,462,880.00
31	KECAMATAN PANCUR	458,880,000.00	456,123,000.00	17,500,000.00	932,503,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	465,084,000.00	464,570,000.00	37,000,000.00	966,654,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	459,601,000.00	507,349,000.00	392,550,000.00	1,359,500,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	537,860,000.00	593,706,000.00	338,500,000.00	1,470,066,000.00
35	KECAMATAN SALE	473,125,000.00	459,105,000.00	239,685,000.00	1,171,915,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	335,830,000.00	474,170,000.00	240,000,000.00	1,050,000,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	457,566,000.00	426,159,000.00	174,000,000.00	1,057,725,000.00
38	KECAMATAN SARANG	360,520,000.00	510,983,000.00	238,500,000.00	1,110,003,000.00
39	INSPEKTORAT	7,371,570,000.00	3,630,054,900.00	224,850,000.00	11,226,474,900.00
40	BAPPEDA	2,183,904,000.00	5,463,490,220.00	699,143,780.00	8,346,538,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6,396,262,000.00	7,723,136,430.00	5,129,799,570.00	19,249,198,000.00
a	(SKPD)	6,396,262,000.00	7,723,136,430.00	5,129,799,570.00	19,249,198,000.00
b	(PPKD)				
42	BKD	2,597,140,000.00	6,107,954,000.00	113,850,000.00	8,818,944,000.00
	JUMLAH	202,820,515,800.00	325,715,413,911.00	255,283,342,685.00	783,819,272,396.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7+8+9
1	DINPENDIKPORA	48,608,860,000.00	47,856,006,245.00	43,856,139,480.00	140,321,005,725.00
2	DINAS KESEHATAN	39,485,881,604.00	64,143,429,847.00	19,892,337,215.00	123,521,648,666.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	58,029,023,734.00	49,898,146,000.00	28,648,839,000.00	136,576,008,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6,013,524,208.00	10,928,207,192.00	49,592,944,866.00	66,534,676,266.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,953,360,708.00	4,064,352,685.00	1,556,885,180.00	7,574,598,573.00
6	SATPOL PP	2,687,558,708.00	912,559,148.00	12,600,000.00	3,612,717,856.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	661,103,708.00	207,965,000.00	9,000,000.00	878,068,708.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	756,415,000.00	1,225,561,708.00	2,054,000,000.00	4,035,976,708.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,671,544,000.00	5,053,235,708.00	1,501,812,000.00	11,226,591,708.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,164,882,758.00	997,672,509.00	626,258,100.00	2,788,813,367.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,074,286,708.00	14,693,730,000.00	3,708,954,462.00	20,476,971,170.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,596,520,008.00	1,907,184,523.00	279,257,000.00	4,782,961,531.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,156,729,600.00	2,105,147,525.00	320,846,571.00	3,582,723,696.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,479,128,000.00	1,695,531,000.00	423,062,128.00	3,597,721,128.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,377,893,708.00	11,115,377,290.00	795,983,249.00	13,289,254,247.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	930,159,000.00	1,302,332,000.00	924,552,000.00	3,157,043,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	978,212,708.00	5,392,381,000.00	2,257,860,000.00	8,628,453,708.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	484,766,708.00	248,000,000.00	-	732,766,708.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,382,944,800.00	2,197,918,818.00	5,530,896,800.00	12,111,760,418.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,030,806,708.00	3,069,747,530.00	1,618,097,020.00	7,718,651,258.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	25,335,748,245.00	10,327,235,119.00	1,445,145,122.00	37,108,128,486.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,217,744,000.00	21,904,546,440.00	1,992,361,000.00	25,114,651,440.00
25	KECAMATAN REMBANG	2,345,777,000.00	1,319,323,393.00	1,654,865,512.00	5,319,965,905.00
26	KECAMATAN KALIORI	419,630,000.00	288,570,600.00	-	708,200,600.00
27	KECAMATAN SULANG	416,256,000.00	244,818,400.00	31,000,000.00	692,074,400.00
28	KECAMATAN SUMBER	342,320,000.00	362,350,800.00	33,000,000.00	737,670,800.00
29	KECAMATAN BULU	672,925,000.00	213,420,300.00	17,478,000.00	903,823,300.00
30	KECAMATAN LASEM	436,922,000.00	515,347,008.00	26,866,000.00	979,135,008.00
31	KECAMATAN PANCUR	394,600,000.00	365,953,800.00	27,500,000.00	788,053,800.00
32	KECAMATAN SLUKE	412,034,000.00	318,190,000.00	56,842,000.00	787,066,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	448,101,000.00	344,597,400.00	360,000,000.00	1,152,698,400.00
34	KECAMATAN GUNEM	447,000,000.00	417,363,600.00	149,325,000.00	1,013,688,600.00
35	KECAMATAN SALE	473,125,000.00	306,603,000.00	-	779,728,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	335,830,000.00	302,182,000.00	103,858,200.00	741,870,200.00
37	KECAMATAN SEDAN	546,566,000.00	288,460,400.00	-	835,026,400.00
38	KECAMATAN SARANG	415,150,000.00	338,159,800.00	11,200,000.00	764,509,800.00
39	INSPEKTORAT	7,258,035,000.00	1,505,291,708.00	167,850,000.00	8,931,176,708.00
40	BAPPEDA	1,852,604,000.00	2,294,779,558.00	637,750,700.00	4,785,134,258.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,854,250,902.00	4,148,607,233.00	1,904,916,588.00	11,907,774,723.00
a	(SKPD)	5,854,250,902.00	4,148,607,233.00	1,904,916,588.00	11,907,774,723.00
b	(PPKD)				
42	BKD	2,016,000,000.00	2,812,786,732.00	87,667,500.00	4,916,454,232.00
	JUMLAH	234,164,220,523.00	277,633,073,019.00	172,317,950,693.00	684,115,244,235.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7-3	12 = 8-4	13 = 9-5	14 = 11+12+13
1	DINPENDIKPORA	20,559,945,000.00	29,803,865,185.00	779,325,740.00	51,143,135,925.00
2	DINAS KESEHATAN	1,569,041,064.00	7,132,554,612.00	(8,930,688,255.00)	(229,092,579.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	11,959,872,734.00	7,318,572,000.00	(1,939,648,000.00)	17,338,796,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(3,089,222,792.00)	(5,274,045,808.00)	(14,614,891,134.00)	(22,978,159,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(260,474,292.00)	(652,718,565.00)	(11,537,558,820.00)	(12,450,751,677.00)
6	SATPOL PP	(85,593,292.00)	(792,409,952.00)	(1,335,437,700.00)	(2,213,440,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(130,708,292.00)	(493,684,100.00)	(27,538,900.00)	(651,931,292.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(344,305,000.00)	(1,738,009,592.00)	(2,879,133,700.00)	(4,961,448,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(615,740,000.00)	(3,998,593,292.00)	64,542,000.00	(4,549,791,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(236,957,242.00)	(1,972,378,136.00)	(4,134,611,255.00)	(6,343,946,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(125,313,292.00)	(15,201,209,165.00)	(3,576,506,373.00)	(18,903,028,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(800,542,742.00)	(2,254,123,077.00)	(5,209,309,900.00)	(8,263,975,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(81,740,400.00)	(674,126,866.00)	(776,503,429.00)	(1,532,370,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(406,361,000.00)	(1,688,839,960.00)	24,877,888.00	(2,070,323,072.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(142,425,292.00)	(926,918,420.00)	(3,735,945,041.00)	(4,805,288,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(240,100,000.00)	(1,266,104,000.00)	(1,477,453,000.00)	(2,983,657,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(167,249,292.00)	(3,241,317,000.00)	(219,705,000.00)	(3,628,271,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(62,743,292.00)	(874,490,000.00)	(40,000,000.00)	(977,233,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(34,167,960.00)	(2,244,819,222.00)	(7,607,249,150.00)	(9,886,236,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(538,385,242.00)	(7,119,239,545.00)	(6,485,565,205.00)	(14,143,189,992.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	7,156,208,245.00	(6,409,435,061.00)	(2,100,143,378.00)	(1,353,370,194.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(681,340,800.00)	(20,549,577,760.00)	(864,329,000.00)	(22,095,247,560.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(129,025,000.00)	(763,677,077.00)	(1,886,730,018.00)	(2,779,432,095.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(174,580,400.00)	(17,700,000.00)	(192,280,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	(57,588,000.00)	(410,565,600.00)	-	(468,153,600.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(54,610,000.00)	(96,417,200.00)	(107,000,000.00)	(258,027,200.00)
29	KECAMATAN BULU	(2,425,000.00)	(138,697,700.00)	2,478,000.00	(138,644,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	29,702,000.00	(7,529,872.00)	5,500,000.00	27,672,128.00
31	KECAMATAN PANCUR	(64,280,000.00)	(90,169,200.00)	10,000,000.00	(144,449,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(53,050,000.00)	(146,380,000.00)	19,842,000.00	(179,588,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(11,500,000.00)	(162,751,600.00)	(32,550,000.00)	(206,801,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(90,860,000.00)	(176,342,400.00)	(189,175,000.00)	(456,377,400.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(152,502,000.00)	(239,685,000.00)	(392,187,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(171,988,000.00)	(136,141,800.00)	(308,129,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	89,000,000.00	(137,698,600.00)	(174,000,000.00)	(222,698,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	54,630,000.00	(172,823,200.00)	(227,300,000.00)	(345,493,200.00)
39	INSPEKTORAT	(113,535,000.00)	(2,124,763,192.00)	(57,000,000.00)	(2,295,298,192.00)
40	BAPPEDA	(331,300,000.00)	(3,168,710,662.00)	(61,393,080.00)	(3,561,403,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(542,011,098.00)	(3,574,529,197.00)	(3,224,882,982.00)	(7,341,423,277.00)
a	(SKPD)	(542,011,098.00)	(3,574,529,197.00)	(3,224,882,982.00)	(7,341,423,277.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	(581,140,000.00)	(3,295,167,268.00)	(26,182,500.00)	(3,902,489,768.00)
	JUMLAH	31,343,704,723.00	(48,082,340,892.00)	(82,965,391,992.00)	(99,704,028,161.00)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	15	16	17	18 = 15+16+17
1	DINPENDIKPORA	48,568,260,000.00	47,719,214,245.00	43,833,531,480.00	140,121,005,725.00
2	DINAS KESEHATAN	39,328,140,349.00	63,581,851,803.00	20,611,656,514.00	123,521,648,666.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	57,029,023,734.00	49,898,146,000.00	29,648,839,000.00	136,576,008,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5,995,899,208.00	10,878,207,192.00	49,560,569,866.00	66,434,676,266.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,981,860,708.00	4,035,852,685.00	1,556,885,180.00	7,574,598,573.00
6	SATPOL PP	2,687,558,708.00	912,559,148.00	12,600,000.00	3,612,717,856.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	661,103,708.00	204,965,000.00	9,000,000.00	875,068,708.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	756,415,000.00	1,325,561,708.00	2,054,000,000.00	4,135,976,708.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,671,544,000.00	5,053,235,708.00	1,501,812,000.00	11,226,591,708.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,164,882,758.00	997,672,509.00	626,258,100.00	2,788,813,367.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,074,286,708.00	14,743,730,000.00	3,708,954,462.00	20,526,971,170.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,596,520,008.00	1,907,184,523.00	279,257,000.00	4,782,961,531.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,156,729,600.00	2,105,147,525.00	320,846,571.00	3,582,723,696.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,479,128,000.00	1,695,531,000.00	423,062,128.00	3,597,721,128.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,377,893,708.00	11,115,377,290.00	795,983,249.00	13,289,254,247.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	930,159,000.00	1,302,332,000.00	924,552,000.00	3,157,043,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	978,212,708.00	5,392,381,000.00	2,257,860,000.00	8,628,453,708.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	484,766,708.00	248,000,000.00	-	732,766,708.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,382,944,800.00	2,197,918,818.00	5,530,896,800.00	12,111,760,418.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,034,541,708.00	3,096,012,530.00	1,618,097,020.00	7,748,651,258.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	25,296,873,245.00	10,370,860,119.00	1,480,395,122.00	37,148,128,486.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,222,944,000.00	22,171,787,000.00	1,992,361,000.00	25,387,092,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	2,345,777,000.00	1,319,323,393.00	1,654,865,512.00	5,319,965,905.00
26	KECAMATAN KALIORI	419,630,000.00	288,570,600.00	-	708,200,600.00
27	KECAMATAN SULANG	416,256,000.00	244,818,400.00	31,000,000.00	692,074,400.00
28	KECAMATAN SUMBER	342,320,000.00	362,350,800.00	33,000,000.00	737,670,800.00
29	KECAMATAN BULU	672,925,000.00	213,420,300.00	17,478,000.00	903,823,300.00
30	KECAMATAN LASEM	436,922,000.00	500,347,008.00	26,866,000.00	964,135,008.00
31	KECAMATAN PANCUR	394,600,000.00	365,953,800.00	27,500,000.00	788,053,800.00
32	KECAMATAN SLUKE	412,034,000.00	318,190,000.00	56,842,000.00	787,066,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	448,101,000.00	344,597,400.00	360,000,000.00	1,152,698,400.00
34	KECAMATAN GUNEM	447,000,000.00	417,363,600.00	149,325,000.00	1,013,688,600.00
35	KECAMATAN SALE	473,125,000.00	306,603,000.00	-	779,728,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	335,830,000.00	302,182,000.00	103,858,200.00	741,870,200.00
37	KECAMATAN SEDAN	546,566,000.00	288,460,400.00	-	835,026,400.00
38	KECAMATAN SARANG	415,150,000.00	338,159,800.00	11,200,000.00	764,509,800.00
39	INSPEKTORAT	7,258,035,000.00	1,505,291,708.00	167,850,000.00	8,931,176,708.00
40	BAPPEDA	1,852,604,000.00	2,294,779,558.00	637,750,700.00	4,785,134,258.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,854,250,902.00	4,132,757,233.00	1,920,766,588.00	11,907,774,723.00
	a (SKPD)	5,854,250,902.00	4,132,757,233.00	1,920,766,588.00	11,907,774,723.00
	b (PPKD)				
42	BKD	2,016,000,000.00	2,812,786,732.00	87,667,500.00	4,916,454,232.00
	JUMLAH	232,946,814,268.00	277,309,483,535.00	174,033,386,992.00	684,289,684,795.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19 = 15-3	20 = 16-4	21 = 17-5	22 = 19+20+21
1	DINPENDIKPORA	20,519,345,000.00	29,667,073,185.00	756,717,740.00	50,943,135,925.00
2	DINAS KESEHATAN	1,411,299,809.00	6,570,976,568.00	(8,211,368,956.00)	(229,092,579.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	10,959,872,734.00	7,318,572,000.00	(939,648,000.00)	17,338,796,734.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(3,106,847,792.00)	(5,324,045,808.00)	(14,647,266,134.00)	(23,078,159,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(231,974,292.00)	(681,218,565.00)	(11,537,558,820.00)	(12,450,751,677.00)
6	SATPOL PP	(85,593,292.00)	(792,409,952.00)	(1,335,437,700.00)	(2,213,440,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(130,708,292.00)	(496,684,100.00)	(27,538,900.00)	(654,931,292.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(344,305,000.00)	(1,638,009,592.00)	(2,879,133,700.00)	(4,861,448,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(615,740,000.00)	(3,998,593,292.00)	64,542,000.00	(4,549,791,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(236,957,242.00)	(1,972,378,136.00)	(4,134,611,255.00)	(6,343,946,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(125,313,292.00)	(15,151,209,165.00)	(3,576,506,373.00)	(18,853,028,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(800,542,742.00)	(2,254,123,077.00)	(5,209,309,900.00)	(8,263,975,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(81,740,400.00)	(674,126,866.00)	(776,503,429.00)	(1,532,370,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(406,361,000.00)	(1,688,839,960.00)	24,877,888.00	(2,070,323,072.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(142,425,292.00)	(926,918,420.00)	(3,735,945,041.00)	(4,805,288,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(240,100,000.00)	(1,266,104,000.00)	(1,477,453,000.00)	(2,983,657,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(167,249,292.00)	(3,241,317,000.00)	(219,705,000.00)	(3,628,271,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(62,743,292.00)	(874,490,000.00)	(40,000,000.00)	(977,233,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(34,167,960.00)	(2,244,819,222.00)	(7,607,249,150.00)	(9,886,236,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	(534,650,242.00)	(7,092,974,545.00)	(6,485,565,205.00)	(14,113,189,992.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	7,117,333,245.00	(6,365,810,061.00)	(2,064,893,378.00)	(1,313,370,194.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(676,140,800.00)	(20,282,337,200.00)	(864,329,000.00)	(21,822,807,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(129,025,000.00)	(763,677,077.00)	(1,886,730,018.00)	(2,779,432,095.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(174,580,400.00)	(17,700,000.00)	(192,280,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	(57,588,000.00)	(410,565,600.00)	-	(468,153,600.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(54,610,000.00)	(96,417,200.00)	(107,000,000.00)	(258,027,200.00)
29	KECAMATAN BULU	(2,425,000.00)	(138,697,700.00)	2,478,000.00	(138,644,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	29,702,000.00	(22,529,872.00)	5,500,000.00	12,672,128.00
31	KECAMATAN PANCUR	(64,280,000.00)	(90,169,200.00)	10,000,000.00	(144,449,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(53,050,000.00)	(146,380,000.00)	19,842,000.00	(179,588,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(11,500,000.00)	(162,751,600.00)	(32,550,000.00)	(206,801,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(90,860,000.00)	(176,342,400.00)	(189,175,000.00)	(456,377,400.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(152,502,000.00)	(239,685,000.00)	(392,187,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(171,988,000.00)	(136,141,800.00)	(308,129,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	89,000,000.00	(137,698,600.00)	(174,000,000.00)	(222,698,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	54,630,000.00	(172,823,200.00)	(227,300,000.00)	(345,493,200.00)
39	INSPEKTORAT	(113,535,000.00)	(2,124,763,192.00)	(57,000,000.00)	(2,295,298,192.00)
40	BAPPEDA	(331,300,000.00)	(3,168,710,662.00)	(61,393,080.00)	(3,561,403,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(542,011,098.00)	(3,590,379,197.00)	(3,209,032,982.00)	(7,341,423,277.00)
	a (SKPD)	(542,011,098.00)	(3,590,379,197.00)	(3,209,032,982.00)	(7,341,423,277.00)
	b (PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	(581,140,000.00)	(3,295,167,268.00)	(26,182,500.00)	(3,902,489,768.00)
	JUMLAH	30,126,298,468.00	(48,405,930,376.00)	(81,249,955,693.00)	(99,529,587,601.00)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26 = 23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(40,600,000.00)	(136,792,000.00)	(22,608,000.00)	(200,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	(157,741,255.00)	(561,578,044.00)	719,319,299.00	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(1,000,000,000.00)	-	1,000,000,000.00	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(17,625,000.00)	(50,000,000.00)	(32,375,000.00)	(100,000,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28,500,000.00	(28,500,000.00)	-	-
6	SATPOL PP	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(3,000,000.00)	-	(3,000,000.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,735,000.00	26,265,000.00	-	30,000,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	(38,875,000.00)	43,625,000.00	35,250,000.00	40,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	5,200,000.00	267,240,560.00	-	272,440,560.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	(15,000,000.00)	-	(15,000,000.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	(15,850,000.00)	15,850,000.00	-
a	(SKPD)	-	(15,850,000.00)	15,850,000.00	-
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	-	-	-	-
	JUMLAH	(1,217,406,255.00)	(323,589,484.00)	1,715,436,299.00	174,440,560.00

PROYEKSI PENERIMAAN RAPBD PERUBAHAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	PEMBAHASAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	9
1.1	Pendapatan Asli Daerah							
1.1.1	Pajak Daerah	307,258,621,706.00	291,002,773,423.00	(16,255,848,283.00)	292,142,773,423.00	(15,115,848,283.00)	1,140,000,000.00	
1.1.2	Retribusi Daerah	100,522,250,000.00	80,026,500,000.00	(20,495,750,000.00)	80,026,500,000.00	(20,495,750,000.00)	-	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	23,051,081,000.00	14,728,896,775.00	(8,322,184,225.00)	14,728,896,775.00	(8,322,184,225.00)	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,840,309,000.00	10,840,309,000.00	-	10,840,309,000.00	-	-	
		172,844,981,706.00	185,407,067,648.00	12,562,085,942.00	186,547,067,648.00	13,702,085,942.00	1,140,000,000.00	
1.2	Dana Perimbangan							
1.2.2	Dana Transfer Umum	1,118,646,021,000.00	1,021,651,523,000.00	(96,994,498,000.00)	1,021,651,523,000.00	(96,994,498,000.00)	-	
1.2.3	Dana Transfer Khusus	854,512,647,000.00	787,373,341,000.00	(67,139,306,000.00)	787,373,341,000.00	(67,139,306,000.00)	-	
		264,133,374,000.00	234,278,182,000.00	(29,855,192,000.00)	234,278,182,000.00	(29,855,192,000.00)	-	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah							
1.3.1	Pendapatan Hibah	465,848,611,000.00	547,236,653,000.00	81,388,042,000.00	547,236,653,000.00	81,388,042,000.00	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	5,000,000,000.00	66,256,175,000.00	61,256,175,000.00	66,256,175,000.00	61,256,175,000.00	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	106,030,000,000.00	105,622,999,000.00	(407,001,000.00)	105,622,999,000.00	(407,001,000.00)	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	354,818,611,000.00	356,270,479,000.00	1,451,868,000.00	356,270,479,000.00	1,451,868,000.00	-	
		-	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,891,753,253,706.00	1,859,890,949,423.00	(31,862,304,283.00)	1,861,030,949,423.00	(30,722,304,283.00)	1,140,000,000.00	

PROYEKSI PEMBIAYAAN R APBD PERUBAHAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	PEMBAHASAN		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	9
3.1	Penerimaan Pembiayaan							
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	162,548,944,056.00	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	82,548,944,056.00	40,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	40,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	-	
		80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	-	80,000,000,000.00	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162,548,944,056.00	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan							
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	89,868,368,000.00	94,168,368,000.00	4,300,000,000.00	89,168,368,000.00	(700,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6,000,000,000.00	10,300,000,000.00	4,300,000,000.00	5,300,000,000.00	(700,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	
		83,868,368,000.00	83,868,368,000.00	-	83,868,368,000.00	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	89,868,368,000.00	94,168,368,000.00	4,300,000,000.00	89,168,368,000.00	(700,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 16 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

BADAN ANGGARAN

Plt. Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

H.BISRI CHOLIL LAQOUF

Drs. DRUPODO, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama muda
NIP. 19670421 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2020

Rabu , 16 September 2020

Dibacakan oleh : SUMARDI

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

*Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Laahaula wala
quwwata illabillah..., Amma ba'da.....*

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten

- => Sdr. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- => Sdr. Staf Ahli & Asisten Bupati, semua Kabag dilingkungan Setda Rembang.
- => Sdr. TAPD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan , terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas semua limpahan Rohmat , nikmat , taufik dan hidayahNYA , yang dikaruniakan pada kita , sehingga sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW .

Sampai saat ini, Pemkab Rembang masih tetap melanjutkan melaksanakan penanganan pandemi Covid-19 , entah sampai kapan belum jelas adanya , dan dalam waktu 84 hari lagi, juga akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada pada 9 Desember 2020 , marilah kita mohon kepada ALLAH SWT, semoga pandemi covid-19 segera diangkat dari bumi ini , dan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap berjalan lancar dan aman, serta kabupaten Rembang tercinta selalu dalam keadaan yang kondusif.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami , terhadap Rancangan Perda , tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2020.

Setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Pj. Sekda , atas nama Bupati yang berhalangan hadir , dalam rapat paripurna ke II, pada hari Rabu yang lalu , tanggal 09 September 2020 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan Penjelasan dan Pendalaman serta pembahasan oleh TAPD bersama Banggar , Alhamdulillah semua dapat berjalan lancar, dan akhirnya dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang direncanakan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup mendalam, dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perubahan APBD tahun 2020 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, **Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrochiim menerima dan menyetujui, RAPERDA** Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, menjadi **PERDA** Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada, di dalam pendalaman pembahasannya.

Dan di dalam Pendapat akhir ini, Kami menyampaikan catatan dan masukan sebagai berikut :

1. Mengingat sisa waktu efektif untuk pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2020, yang tinggal 85 hari kalender, dan masih adanya beberapa program kegiatan penanganan sarana prasarana infra struktur yang masih rusak, dan belum tertangani, antara lain jalan poros Lingkar kota Rembang, sarana jalan poros di wilayah Kecamatan Sale, dan di wilayah kecamatan yang lain, serta sarana prasarana lain yang juga harus ditangani. Sehubungan dengan hal tersebut, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mohon dan mendorong, supaya Pemkab Rembang selalu bekerja extra keras dan serius, agar program sisa kegiatan yang penganggarnya masuk dalam APBD Perubahan tahun 2020 ini, dapat benar-benar dilaksanakan, baik fisik maupun kegiatan yang lain, sehingga progress penyerapan anggarannya maksimal, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
2. Terkait dengan sudah mulainya masuk pada musim kemarau yang cukup panas dan kering ini, kami mengingatkan dan menghimbau agar Pemkab Rembang, khususnya kepada OPD terkit, selalu waspada dan siaga, untuk melakukan antisipasi terhadap adanya bahaya kebakaran, kekeringan dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. ✓

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini, Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan kemudahan ALLAH SWT, sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

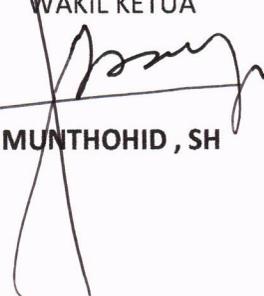
Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamitthoriik

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 16 September 2020

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

WAKIL KETUA

MUNTHOHID, SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI, SPDi



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN
ANGGARAN 2020
disampaikanoleh.....

Assalamualaikum, wr.wb.

Yang terhormat Saudara Bupati dan wakil Bupati Rembang

Yang terhormat Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang;

Yang terhormat Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat Pj. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat Para Pejabat dilingkungan Pemkab Rembang serta Para Camat Se-Kabupaten Rembang

Yang terhormat Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kab. Rembang dengan agenda penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020 dalam Keadaan Sehat Wal'afiat.

Sidang Paripurna yang kami hormati.

Demi menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang berkualitas dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Rembang dan Pemerintah Daerah telah menjalani masa rapat dalam rangka membahas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Keseluruh rangkaian rapat yang telah diselenggarakan, dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan. Kesungguhan DPRD dan seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh melelahkan, diskusi yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis-konstruktif, baik dalam rapat kerja komisi, maupun dalam rapat Badan Anggaran. Oleh karena itu FPKB menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan telah menunjukkan komitmen kemitraan selama masa rapat ini.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, FPKB memandang perlu untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Seluruh hasil pembahasan termasuk beberapa pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran program-program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, FPKB berharap agar semua OPD sebagai pengelola anggaran bersungguh-sungguh dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap maksimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Rembang. FPKB berharap Pilkada Rembang 2020 tidak mengganggu jalannya Pembangunan di Kab. Rembang.
2. Program-program dan kegiatan-kegiatan di tiap OPD agar kedepan direncanakan lebih matang dari sisi kemanfaatan, anggaran dan teknis pelaksanaan agar program dan kegiatan tersebut betul-betul berkualitas, bermanfaat, afektif dan efisien.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikian beberapa catatan yang kami sampaikan dan selanjutnyaDengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020.

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya .

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit torieq

Wasalammu'allaikumWr. Wb.

Rembang, 16 September 2020

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN REMBANG



ILYAS

Ketua



NASIRUDIN, S.Si

sekretaris



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;

Yth. Saudara Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**" dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui Raperda Perubahan tentang APBD merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kami telah melakukan sinkronisasi pembahasan Raperda perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami fraksi NasDem akan menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Pendapat akhir ini bertujuan untuk memberikan masukan dan saran agar pembangunan di Kabupaten Rembang menjadi lebih baik.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijin kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi NasDem terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi covid-19, penggunaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 harus memprioritaskan pelayanan kesehatan, pelayanan publik, menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
2. RSUD dr. R. Soetrasno Rembang sebagai rumah sakit rujukan covid-19 dengan daya tampung tempat tidur 90 pasien akan tetapi belum memiliki alat PCR swab. Saat ini alat PCR swab menjadi kebutuhan yang diperlukan. Mohon pemerintah Kabupaten Rembang untuk menganggarkan pembelian alat tersebut.
3. Sehubungan dengan belanja daerah, kami mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Rembang konsisten dengan RPJMD dan akan memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
4. Belanja subsidi sebesar Rp. 6.600.000.000,00 yang di alokasikan sebagai pinjaman lunak untuk para pelaku UMKM, dalam pelaksanaannya harus benar-benar tepat sasaran dan bersih dari kepentingan politik.
5. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah daerah harus transparan dalam penggunaan APBD.

6. Kami **menerima dan menyetujui** Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda.

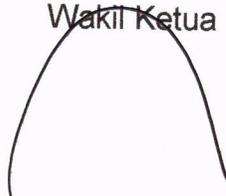
Demikian Pendapat Akhir ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 16 September 2020

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Wakil Ketua



KHAMID, SE, Sy.

Sekretaris



FRIDA IRIANI





FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

Hari / Tanggal : Rabu / 16 September 2020

Dibacakan oleh : Adi Purwoto

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Mengawali penyampaian Pendapat fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat kami dari Fraksi PDI Perjuangan atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Setelah kami melakukan pembahasan di Fraksi, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2020 ini untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah, dengan catatan :

- Mengingat waktu efektif yang tersisa untuk pelaksanaan kegiatan Dinas yang tinggal 3 (tiga) Bulan lagi, kami mengharapkan OPD – OPD dapat bekerja lebih keras untuk dapat memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut, sehingga tidak menjadikan SILPA yang tinggi.
- Melihat adanya peningkatan angka penderita Covid-19 yang cukup tinggi di beberapa Kecamatan dan mengantisipasi munculnya Klaster-Klaster baru menjelang diadakannya Pilkada di Kabupaten Rembang, kami berharap anggaran Perubahan APDB 2020 ini dapat segera digunakan secara maksimal oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sehingga dapat menekan angka kenaikan penderita Covid-19 di Kabupaten Rembang.

Semoga ini menjadi evaluasi kita bersama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang ini supaya perencanaan tahun – tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dan pembangunan di Kabupaten Rembang ini selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi.

Demikian telah kami sampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil pembahasan atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari Allah SWT dalam beraktivitas ditengah situasi pandemi wabah *Covid-19* ini. Dan tak lupa untuk kita selalu berdoa, semoga Allah SWT semoga situasi pandemi wabah *Covid-19* ini dapat segera mereda. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

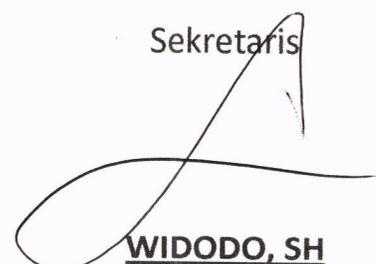
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


JASMANI



Sekretaris


WIDODO, SH

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
DEMOKRAT- HANURA
ATAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**



FRAKSI DEMOKRAT- HANURA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 16 SEPTEMBER 2020

Dibacakan oleh : H. ACHMAD ZAMHURI, S.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
ATAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

RABU, 16 SEPTEMBER 2020

Dibacakan oleh : H. ACHMAD ZAMHURI, S.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati, wakil bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat-Hanura marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD ini dalam rangka penyampaian Pendapat akhir Fraksi atas Raperda Perubahan APBD tahun 2020 Kabupaten Rembang dan kita juga selalu berdo'a kepada Allah SWT supaya virus covid-19 dilenyapkan dari muka bumi ini.

Bupati , Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Syukur Alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal sampai selesai berjalan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami Fraksi Demokrat-Hanura **menyetujui** Raperda Perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun 2020.

Setelah kita menyetujui Raperda ini menjadi Perda kami Fraksi Demokrat-Hanura berharap supaya apa yang sudah kita rencanakan dan dilaksanakan dengan baik dan tuntas, Fraksi Demokrat-Hanura kembali memberikan beberapa saran, pendapat dan masukan demi kebaikan kedepannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Anggaran Perubahan ini sangat berat karena ditengah Pandemi Covid-19 dan waktu pelaksanaannya yang singkat kami Fraksi Demokrat berharap supaya yang rehab berat harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kualitas pekerjaanya jangan dikerjakan asal-asalan karena waktu pengerjaannya yang singkat untuk itu perlu disesuaikan dengan waktunya.
2. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak parah kami Fraksi Demokrat-Hanura berharap supaya proyek ini dikerjakan pada Anggaran Perubahan ini dan apabila waktunya tidak cukup kami minta supaya tetap dianggarkan di Tahun Anggaran 2021.

3. Untuk belanja hibah kepada kelompok tani tembakau 10 kelompok dengan nilai 60 jutaan kami Fraksi Demokrat-Hanura menyakini tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran karena selama ini hanya kelompok tertentu saja yang selalu mendapat bantuan setiap tahunnya dan anggaran perubahan dicairkan pada bulan november sedangkan pada bulan itu tembakau sudah habis.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 16 September 2020

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA



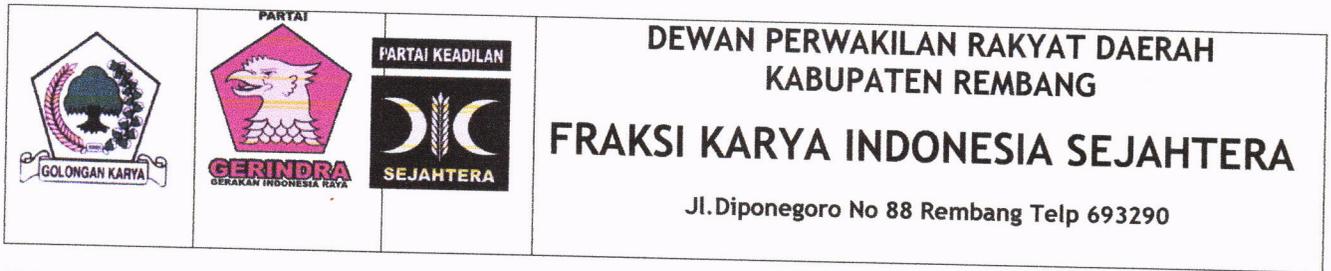
MUGIARTO, S.T



SEKRETARIS



DUMADIYONO, S.H.



**PENDAPAT FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Rembang

Hari Rabu, 16 September 2020

Juru Bicara: AGUS SUTRISNO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pejabat Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajaran Sekretariat Dewan serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara Banggar bersama TAPD dan OPD terkait, maka saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera atas hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2020 sbb.

- Sampai akhir Agustus 2020 ini penyerapan APBD 2020 oleh OPD masih kurang dari 30 %. Sisa waktu tinggal 2,5 bulan efektif apalagi perhatian kita tersedot pada penyelenggaraan Pilkada. Ibarat jauh panggang dari api, kami sebagai warga masyarakat Rembang harap-harap cemas kapan program-program pembangunan TA 2020 ini bisa diselesaikan. Ditambah lagi dengan perkembangan anggaran dalam APBD Perubahan ini.

Maka Fraksi Karya Indonesia Sejahtera berharap Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja cepat, karena waktu pelaksanaan yang singkat, namun tetap berhati-hati dalam membelanjakan uang rakyat, digunakan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi pemborosan atau mengambil untung demi kepentingan pribadi.

- Adanya penyalahgunaan perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada investor, dengan modus kegiatan ilegal berupa pengurangan lokasi proyek dengan material yang patut diduga bukan dari hasil pertambangan resmi dan patut diduga belum membayar pajak Gol. C, sehingga potensi PAD menjadi hilang. Untuk itu Fraksi Karya Indonesia Sejahtera merekomendasikan bagi siapa saja investor yang menyalahgunakan perijinan agar Pemerintah Kabupaten Rembang bertindak tegas.
- Penyaluran bantuan pinjaman lunak sebesar Rp 55 milyar yang diberikan kepada pedagang dan UMKM berdampak corona hendaknya dilakukan kepada seluruh golongan dan kelompok terdampak, tidak terpusat pada satu golongan atau kelompok saja.
- Sosialisasi program bantuan pinjaman lunak tersebut harus dilakukan secara massif, sehingga bisa diakses oleh seluruh pedagang dan UMKM.
- Melihat fenomena kebocoran PAD dari sektor retribusi daerah seperti parkir, pasar, TPI dan sumber pendapatan daerah yang lain, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang mengambil tindakan yang tegas kepada oknum penyebab kepercobaan tsb.
- Dengan beralihnya uji kendaraan dari manual ke smart card, ternyata kita belum punya Perda dan perangkat aplikasinya, maka pada kesempatan ini Fraksi Karya Indonesia Sejahtera mendesak agar hal ini segera direalisasikan.

- Terkait dengan IMB sebagai sumber pendapatan daerah, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera mendesak Pemerintah Kabupaten Rembang melalui OPD terkait agar pro aktif jemput bola ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Lumpuhnya fungsi sekolah sebagai pembentuk karakter anak menyebabkan kekhawatiran dan keresahan para orang tua, guru dan pengelola sekolah akan nasib dan masa depan anak-anak ke depan. Sehubungan hal tersebut Fraksi Karya Indonesia Sejahtera mohon kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bijak menyikapi hal ini dan lebih berani membuat terobosan agar substansi pendidikan karakter anak dapat terus dipertahankan di masa pandemi ini.

Dengan catatan-catatan yang kami sampaikan di atas, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyatakan "SETUJU" Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2020 ini ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2020.

Para rawuh ingkang minulya.

Amungkasi pamanggih fraksi menika kepareng kawula ngaturaken piwelingn Begawan Abiyasa nalika amisuda Prabu Puntadewa dados Raja Amarta mekaten. "*Wong kang darbe panguwasa, menawa arep nibakake pitenah utawa paukuman marang wong kang luwih endhek palungguhane iku paribasan suwe mijet wohing ranti. Nanging ngertenana, wong luhur kang gelem nyanak, ngraketi lan ngajeni wong cilik iku ora bakal ilang kaluhurane*".

Mangga sesarengan kita nyenyuwun dateng Gusti Alloh ingkang Maha Kuwaos, mugi mugi pagebluk corona menika enggal sirna saking Indonesia lan kita saged makarya kanthi prayogi.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat *Fraksi Karya Indonesia Sejahtera* kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan, rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,



AGUS SUTRISNO

Sekretaris,



PUDJI SANTOSA, SP, MH





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 16 September 2020;

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 16 September 2020;

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 16 September 2020;

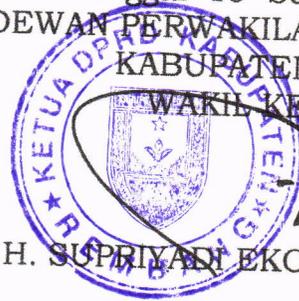
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 September 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
WAKIL KETUA DPRD,



H. SUPRIYADI EKO PRAPTO MO, S.E.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 /1904/ 2020

NOMOR : 900 / 39/ 2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pada Hari ini **Rabu tanggal enam belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. H. Supriyadi Eko Praptomo,S.E** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 3. Ridwan, S.H., M.H.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

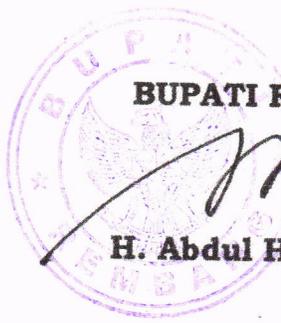
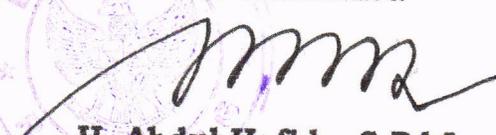
Menyatakan bahwa :

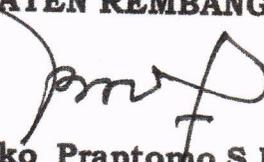
1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menyesuaikan dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini.

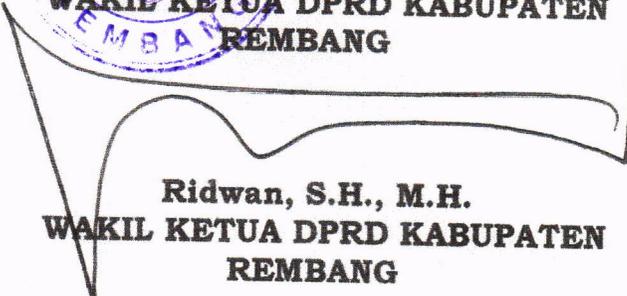
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 16 September 2020


BUPATI REMBANG

H. Abdul Hafidz, S.Pd.I.


DPRD KABUPATEN REMBANG

H. Supriyadi Eko Praptono, S.E.
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


Ridwan, S.H., M.H.
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**
Rembang, 16 September 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang;
- Ykh. - Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Kepala OPD dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali sambutan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka **Persetujuan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020**, dalam keadaan sehat wal'fiat.

Kami sampaikan "**terima kasih**" kepada semua pihak, terutama jajaran DPRD Kabupaten Rembang yang telah mendukung dan mencurahkan perhatian dengan semangat yang tinggi membahas hingga selesainya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sehingga berjalan lancar dan tepat waktu.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pembahasan Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan bertujuan untuk mengantisipasi perubahan program dan kegiatan baru daerah yang tentunya mempengaruhi belanja daerah, selain hal tersebut guna

mempercepat program-program pembangunan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menikmati program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung aspirasi berbagai program dan kegiatan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan perubahan anggaran ini diharapkan dapat menyempurnakan program atau kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum teranggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020, baik kegiatan yang bersifat keharusan dan

instruksional, serta dapat mempercepat pencapaian tahapan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada tahun 2020 dalam melaksanakan aktivitas pemerintah dan pembangunan Kabupaten Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk memacu

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.861.030.949.423,- (*Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), mengalami penurunan sebesar 1,62% dari APBD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.891.753.253.706,- (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*), maka terdapat penurunan sebesar Rp. 30.722.304.283,- (*Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Selanjutnya untuk Rancangan Anggaran Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.892.006.377.240,- (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) mengalami penurunan

sebesar 3,69%, dibanding anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.964.433.829.762,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), maka terjadi Penurunan sebesar Rp. 72.427.452.522,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat defisit sebesar Rp. 30.975.427.817,- (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 30.975.427.817,- (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah), sehingga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi *balance*.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melalui rapat Paripurna ini pula, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan **terima kasih** kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan OPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan bahwa saat ini sudah ada Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Jika selama ini protokol kesehatan sebatas himbauan, dengan adanya peraturan bupati tersebut menjadi sebuah kewajiban.

Secara Umum di dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur adanya kewajiban bagi perseorangan untuk melakukan 4 M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Mengindari kerumunan pada kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pembelajaran, bekerja di tempat kerja, rumah makan, pasar, perhotelan, tempat hiburan dan sebagainya.

Sedangkan bagi pelaku usaha, maupun pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diwajibkan menyiapkan sarana prasarana 4 M tersebut.

Jika melanggar kewajiban, dikenai sanksi. Bagi Perseorangan sanksi tersebut berupa teguran lisan atau tertulis, pembinaan sosial, pembinaan fisik, dan membersihkan fasilitas umum. Ada pula sanksi administrasi berupa membeli masker untuk dipakai sendiri.

Dan Bagi Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sanksinya berupa teguran lisan atau tertulis hingga pencabutan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya minta bantuan para Dewan untuk ikut mensosialisasikan perbup tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang


H. ABDUL HAFIDZ, SPd. I.